ORASI PENGUKUHAN PROFESOR RISET
BIDANG *POST*-KOLONIAL

MENGGUGAH EMPATI, MENARIK SIMPATI: KEKUATAN ETNOGRAFI *POST*-KRITIS DALAM MENDORONG KEBIJAKAN BERBASISKAN KEBUDAYAAN LOKAL

OLEH:

M. ALIE HUMAEDI

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
JAKARTA, 14 MEI 2020

Buku ini tidak diperjualbelikan.

LIPI

MENGGUGAH EMPATI, MENARIK SIMPATI: KEKUATAN ETNOGRAFI *POST*-KRITIS DALAM MENDORONG KEBIJAKAN BERBASISKAN KEBUDAYAAN LOKAL

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh atau sebagian
dari buku ini dalam bentuk atau cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

All Rights Reserved

Buku ini tidak diperjualbelikan.

LIPI

ORASI PENGUKUHAN PROFESOR RISET
BIDANG STUDI *POST*-KOLONIAL

MENGGUGAH EMPATI, MENARIK SIMPATI: KEKUATAN ETNOGRAFI *POST*-KRITIS DALAM MENDORONG KEBIJAKAN BERBASISKAN KEBUDAYAAN LOKAL

OLEH:
M. ALIE HUMAEDI

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
JAKARTA, 14 MEI 2020

Buku ini tidak diperjualbelikan.

© 2020 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Menggugah Empati, Menarik Simpati: Kekuatan Etnografi *Post*-Kritis dalam Mendorong Kebijakan Berbasiskan Kebudayaan Lokal/M. Alie Humaedi. Jakarta – LIPI Press, 2020.
xi + 61 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-602-496-131-2 (cetak)
978-602-496-132-9 (*e-book*)

1. Etnografi *Post*-Kritis
2. Kebijakan
3. Kebudayaan lokal

305.8

Copy editor : Noviastuti Putri Indrasari
Proofreader : Martinus Helmiawan
Penata Isi : Meita Safitri
Desainer Sampul : D.E.I.R. Mahelingga
Cetakan : Mei 2020

LIPI

Diterbitkan oleh:
LIPI Press, anggota Ikapi
Gedung PDDI LIPI, Lantai 6
Jln. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta 12710
Telp.: (021) 573 3465
e-mail: press@mail.lipi.go.id
website: lipipress.lipi.go.id
LIPI Press
@lipi_press

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BIODATA RINGKAS

M. Alie Humaedi, Lahir di Babakan Cirebon, tanggal 20 Juli 1976, adalah anak keempat dari H. Ma'mun Alie dan Hj. Tusrinah. Menikah dengan Hj. Uswatun Hasanah, S.Th.I., dan dikaruniai tiga orang anak, yaitu Lautan Hesychia Hayes Usha (2001), Aliena Anaqu Arung Pasisir (2006), dan Merha Ihsha Lembayung Bumi (2008).

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 42/M Tahun 2016 Tanggal 15 Juli 2016 yang bersangkutan diangkat sebagai Peneliti Ahli Utama terhitung mulai 1 Juli 2016.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 95/A/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Pembentukan Majelis Pengukuhan Profesor Riset, yang bersangkutan dapat melakukan pidato Pengukuhan Profesor Riset.

Menamatkan Sekolah Dasar (SD) Negeri Gebang Kulon 1 Cirebon tahun 1988, Madrasah Tsanawiyyah Negeri (MTsN) Babakan Cirebon tahun 1991, dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Cirebon I tahun 1994. Memperoleh gelar Sarjana Agama (S1) bidang Tafsir Hadis dari Fakultas Ushuluddin, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1998, Magister Agama (M.Ag) bidang Hubungan Antar Agama dari Program Agama dan Filsafat, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga tahun 2001, Magister kedua dari Magister Humaniora (M.Hum) di bidang Kajian Budaya dari Program Magister Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tahun 2004, dan gelar Doktor (Dr) Studi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Islam pada bidang Antropologi Agama dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2008 dengan predikat *Cumlaude*.

Mengikuti beberapa pelatihan terkait bidang kompetensinya, antara lain pelatihan etnografi di Universitas Indonesia (2002–2003), pelatihan penelitian sejarah dan etnografi pada program "Indonesia Across Orders" *Netherland Institute voor Oorlogs Documentatie* (NIOD, 2004–2006), pelatihan terkait bidang investigasi, evaluasi program, dan pemberdayaan di beberapa lembaga swadaya masyarakat serta lembaga donor nasional dan internasional.

Pernah bertugas sebagai *livelihood investigator* Yayasan Tanggul Bencana di Indonesia (YTBI) dan *Christian Aid* di Aceh (2006), peneliti program Netherland Institute *voor Oorlogs Documentatie* (NIOD Belanda, 2004–2006); *Lead Researcher* Kebencanaan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Urusan Kemanusiaan (UNOCHA, 2007–2008, 2012), penulis utama di Dewan Analisis Strategis, Badan Intelijen Negara (2014–2015), Koordinator Evaluator Program "Penataan Wilayah di Desa-desa Adat Maluku (Australia Aid, 2015), *External Evaluator* program International Moslem Aid (2016), dan Konsultan Ahli Yayasan Kausa Resiliensi Indonesia (YKRI)-PLAN Indonesia untuk *Urban Nexus* (2020). Secara *adhoc*, pernah menjabat sebagai *Deputy Director Social Culture and Public Awareness*, Asia Pacific Center for Ecohydrology LIPI (2016–2017).

Jabatan fungsional peneliti diawali sebagai Peneliti Ahli Muda golongan IIId tahun 2010, Peneliti Ahli Madya Golongan IVb tahun 2014, dan memperoleh jabatan Peneliti Ahli Utama golongan IVe bidang kebudayaan sub-kekhususan *Post*-Kolonial.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Menghasilkan 89 karya tulis ilmiah, baik yang ditulis sendiri maupun bersama penulis lain dalam bentuk buku, jurnal, dan prosiding. Sebanyak empat KTI ditulis dalam bahasa Inggris dan 85 KTI ditulis dalam bahasa Indonesia.

Ikut serta dalam pembinaan kader ilmiah, yaitu sebagai pembimbing jabatan fungsional pada Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan LIPI, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; pembimbing tesis pada Universitas Pertahanan, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an; dan pembimbing disertasi (S3) pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Aktif dalam profesi ilmiah, yaitu sebagai anggota tim teknis pembentukan Himpunan Peneliti Indonesia/Himpenindo (2014), wakil ketua bidang pemberdayaan Organisasi Himpenindo (2015–2018), Sekretaris Bidang Dokumentasi dan Publikasi Ilmiah Masyarakat Sejarawan Indonesia MSI (2015–2019), dan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan (Pergizi Pangan), Periode 2019–2024 sebagai anggota bidang Pengembangan dan Penerapan Iptek.

Menerima tanda penghargaan Satyalancana X Tahun (2018) dari Presiden Republik Indonesia.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN KALIJOGO

YOGYAKARTA – INDONESIA

DAFTAR ISI

BIODATA RINGKAS v
PRAKATA PENGUKUHAN xi

I. PENDAHULUAN 1

II. PARADOKS KEBIJAKAN DAN KEBUDAYAAN 4
2.1 Paradoks Kebijakan-Kebudayaan: Perspektif Teoretis 4
2.2 Mengatasi Kelemahan Etnografi: Suatu Elaborasi 7

III. APLIKASI ETNOGRAFI *POST*-KRITIS 11
3.1 Empati dan Simpati dalam Aspirasi Kebutuhan Pelaku 11
3.2 Emik dan Etik dalam Strategi Pengentasan Kemiskinan 12
3.3 Elaborasi Aksi dan Sakralitas: Mekanisme Evaluasi 13
3.4 Rumusan Pendampingan dalam Pemajuan Kebudayaan 15

IV. ETNOGRAFI *POST*-KRITIS: KONTRIBUSI TEORETIS PENDEKATAN BARU 16

V. MENENGAHI PARADOKS KEBIJAKAN: KONTRIBUSI PRAKSIS PEMBANGUNAN 21

V. KESIMPULAN 22

VI. PENUTUP 23

UCAPAN TERIMA KASIH 24
DAFTAR PUSTAKA 26
DAFTAR PUBLIKASI ILMIAH 34
DAFTAR PUBLIKASI LAINNYA 45
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 52

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

PRAKATA PENGUKUHAN

Bismillaahhirrahmaannirrahiim

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua

Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia dan hadirin yang saya hormati.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga dalam kesempatan ini kita dapat berkumpul dan bersama-sama hadir pada acara orasi ilmiah pengukuhan Profesor Riset di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan segala kerendahan hati, izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul:

"MENGGUGAH EMPATI, MENARIK SIMPATI
KEKUATAN ETNOGRAFI *POST*-KRITIS
DALAM MENDORONG KEBIJAKAN
BERBASISKAN KEBUDAYAAN LOKAL"

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

I. PENDAHULUAN

Sistem sosial masyarakat Indonesia belum terlepas dari pengaruh tatanan tradisionalnya[1]. Hegemoni kelompok kelas menengah atas dalam berbagai keputusan pembangunan masih kuat. Tujuannya, memenuhi kebutuhan eksistensi[2]. Adapun kelompok kelas bawah, seperti orang miskin, komunitas adat terpencil, penyintas, dan difabel berusaha memenuhi kebutuhan dasar[3]. Aktualisasi kedua kelompok ini menjadi persoalan kebudayaan lokal yang memiliki dimensi emik (*native point of view*)[4]. Dimensi ini diartikan deskripsi dan cara pandang masyarakat yang mengacu pada kekhasan budaya (*culture-specific*). Pemahaman atasnya memerlukan metode *grounded* induktif. Keadaan ini semakin pelik saat berhadapan dengan kebudayaan luar (*liyan*), seperti pembangunan, kebijakan, dan program yang memiliki dimensi etik *(scientist's viewpoint)*[5]. Dimensi ini adalah sudut pandang luar yang berjarak (peneliti/aktor kebijakan) untuk menjelaskan fenomena. Etik mengacu prinsip universal yang dilansirkan pada nilai umum (deduktif).

Fenomena *liyan* menunjukkan ketidaksinkronan antara satu dan lainnya sehingga banyak kebijakan dan program bertumpang tindih dan tidak efektif[6]. Terlebih jika kepentingan elektoral ikut merumuskan sasaran dan target tertentu[7]. Pembangunan terjebak ke ritual prosedural[8] yang bertumpu pada soal administrasi dan penyerapan dana. Proses ini terlihat pada mekanisme formal tanpa peduli atas dimensi emik. Dimensi ini tidak lepas dari masalah, khususnya terkait relasi dan hegemoni sosial, tetapi tidak sebesar dimensi etik kebijakan yang tertuju pada keselarasan dan keutuhan ide, tujuan serta keahlian agen pembangunan[9]. Masalah etik lainnya, pembangunan harus memenuhi syarat legal administratif dan saran akademisi teknokratis-formalistik.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Pemerintah, akademisi, dan para agen akan mengutamakan data solid, logosentrisme statistik, dan rasionalitas dalam keputusan. Mereka pun terjebak kembali pada 'formalitas akademis'[10], dan menafikan kearifan lokal yang penuh *virtue ethic*[11]. Padahal, kebudayaan ini terbukti memantik strategi bertahan hidup[12].

Pembangunan sebagai dimensi etik dan sistem sosial sebagai dimensi emik memiliki persoalan dan paradoksnya, terlebih saat keduanya saling berhadapan. Dimensi etik dengan seperangkat tujuan dan pelaku diatur secara struktural, dan dimensi emik yang bertujuan kolektif dengan perangkatnya yang ditetapkan secara kultural. Dua paradoks bersifat internal, yaitu (i) paradoks pelaku budaya serta (ii) paradoks kebijakan dan program. Satu paradoks tambahan bersifat eksternal, yaitu saat kebudayaan lokal dan kebijakan saling berhadapan yang berubah menjadi paradoks pembangunan.

Tiga paradoks tersebut kurang diperhatikan pemerintah dan akademisi formal. Mereka berpegang pada dimensi etiknya, bahwa keberhasilan pembangunan melalui kebijakan bertumpu pada ritual prosedural dan formalitas akademisi yang tersirat dalam keutuhan data dan penjabaran langkah pembangunan. Ketidakmampuan memosisikan ketiga paradoks tersebut secara tepat mengakibatkan ketimpangan. Kenyataan ini diperkuat oleh kepentingan pasar, di mana si miskin diposisikan sebagai pihak pemanggul beban dari apa yang disebut partisipasi. Kegotongroyongan dianulir sebagai cara si miskin mengakses kebijakan[13].

Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo menggelontorkan dana sangat besar[14], tetapi kurang mengangkat kelompok bawah untuk tidak berhenti pada tahap *basic needs*. Target *Sustainable Development Goals* (SDGs) belum banyak tercapai[15]. Ada masalah saat negara "memajukan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kesejahteraan dan menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia" dengan berbagai kebijakan, tetapi sebagian rakyat masih tetap berada pada kerentanan dan keterbatasannya[16]. Paradoks ini dapat dipetakan, dipahami, dan ditindaklanjuti dengan solusi atas dasar elaborasi perspektif emik dan etik oleh peneliti yang menggunakan pendekatan dan metode etnografi.

Etnografi yang dimaksud adalah "Etnografi *Post*-Kritis" yang mengelaborasi tradisi etnografi realis dan kritis[17]. Ada dua karakter pendekatan etnografi "*post*-kritis". *Pertama*, kedekatan personal dan jalinan komunitas yang dibangun berdasar empati dan simpati. Dua sifat *rapport* itu adalah kunci pemahaman mendalam. Empati adalah kemampuan mental menyadari perasaan untuk membantu. Adapun simpati diartikan sebagai perasaan belas kasih atas kejadian. Empati dan simpati akan muncul saat peneliti berada langsung pada kelompok subjek. Keduanya dikapitalisasi dengan proses relativisme subjektivitas. *Kedua*, kekuatan data etnografis hasil elaborasi emik dan etik diajukan dalam (i) identifikasi kebutuhan; (ii) strategi pelaksanaan; (iii) sistem pengawasan; (iv) skenario pembangunan keberlanjutan.

Etnografi '*Post*-Kritis' dapat menjadi jembatan emas di antara dua tempat (*al-manzilatu bainal manzilataini*)[18]. Prinsip etnografi '*Post*-Kritis' berusaha mengangkat perspektif emik kebudayaan lokal di tengah tujuan dan perspektif etik. Ia mengatasi paradoks internal dan eksternal kebudayaan diri atau *liyan*. Kekuatan empati dan simpati yang bersifat relativisme subjektivitas menjadi ciri atau *novelty* etnografi "*Post*-Kritis". Sebelumnya, etnografer bertumpu pada 'kepentingan penelitian' atas subjek. Dengan landasan ini, ada usaha elaborasi emik dan etik dalam bahasa teknis kebijakan[19]. Tujuannya mengangkat sistem sosial budaya dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program, tanpa harus menghilangkan tujuan pembangunan sekaligus tanpa mengurangi kritisisme kelompok gerakan sosial baru dalam perjuangan keadilan sosialnya.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

II. PARADOKS KEBIJAKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasca-kolonisasi, Indonesia secara resmi menjadi negara yang memiliki tujuan. Pencapaiannya dilakukan dengan kebijakan sentralisasi pada masa Orde Lama dan Orde Baru serta arah pembangunannya (GBHN, Rapelita, dan Trilogi). Kebijakan ini diubah saat Reformasi dengan desentralisasi dianggap sebagai cara pemerataan[20]. Semangatnya bertumpu pada visi-misi presiden yang dituangkan dalam kebijakan. Presiden SBY dengan *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi, dan Joko Widodo dengan Nawacita-nya. Semua visi didukung dana ribuan triliun[21]. Namun, kesejahteraan belum meningkat dan tidak merata. Hal ini terjadi karena kebijakan sering menguap, sekadar ritual prosedural dan uji coba relasi formalis akademisi-teknokrat[22]. Dimensi emik dieksklusi dan aspek etik-normatif dianggap dapat memenuhi target kebijakan.

Sekalipun ada musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), tidak serta-merta menjadi sarana dialog emik kebudayaan dan etik kebijakan. Musrenbang hanya menjadi sarana sosialisasi dan penguatan semangat ritual prosedural dan formalisme akademik aktornya. Dengan kondisi itu, pendekatan etnografi '*post*-kritis' yang dituangkan dalam strategi dan model pada laporan teknis, opini, abstraksi, dan tulisan ilmiah dapat mengafirmasi penyusun dan pelaksana dapat mengakomodasi dimensi emik pada kebijakan.

2.1 Paradoks Kebijakan-Kebudayaan: Perspektif Teoretis

Pembangunan yang dituangkan dalam kebijakan dan program adalah media pencapaian tujuan bernegara. Pembangunan tidak semata ekonomi, politik, atau alih teknologi, tetapi sarat aspek sosial budaya[23]. Sayangnya pemerintah dan akademisi ritual

Buku ini tidak diperjualbelikan.

prosedural terjebak pada konsep pembangunan berbasis data kuantitatif deduktif yang bernilai ekonomi politik. Keadaan ini terlihat pada kepatuhan atas konsep tahapan pembangunan[24]. Istilah negara maju, negara ketiga, dan negara terbelakang pun muncul. Semua negara dan entitasnya berusaha melepaskan diri dari posisi terbelakang. Pergolakan ini ditegaskan Sen[25] sebagai *development paradox*, suatu rujukan timpangnya pembangunan antara negara maju dan berkembang serta antara desa dan kota.

Istilah negara ketiga yang melekat pada negara lemah ekonomi dan terikat kebudayaan sebagai terma bentukan demi kepentingan ekonomi politik formalistik. Artinya masyarakat negara ketiga yang mempraktikkan kebudayaan lokal dianggap baru di tahap pertama dan kedua[26]. Bangunan konsepsi seperti ini lahir dari teori ekonomi makro yang bersandar pada peran pasar dalam alokasi sumber daya dan persepsi kebijakan. Jika kebudayaan menjadi bagian kebijakan ekonomi makro, ia diartikan oleh para aktor kebijakan secara artifisial parsial. Akibatnya, kebudayaan sekadar pemoles kebijakan, bahwa negara seolah peduli atas kebudayaan lokal warga negaranya.

Paradoks pembangunan akan melahirkan kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, dan krisis moral[27]. Hal ini disebabkan pembangunan hanya dilihat dari aspek ekonomi dan hegemoni. *Virtue ethic* kebudayaan yang seharusnya menjadi pedoman justru ditinggalkan. Dalam konteks internasional, *bushido* Samurai diakomodasi sebagai nilai kerja dan berdaya saing Jepang[28]. Pada konteks Indonesia, *siri'na pacce* Bugis dapat dikemas sebagai mekanisme sosial mencipta insan unggul. Karenanya, meninggalkan dimensi emik kebudayaan berarti mengantarkan pembangunan pada proses kegagalan.

Model pembangunan (i) didasarkan pemahaman utuh kebutuhan nasional; (ii) bergerak pada kecepatan; (iii) menuju tujuan yang dipersepsikan[29]; (iv) pertumbuhan ekonomi; serta

Buku ini tidak diperjualbelikan.

(v) pembangunan berkeadilan dan tidak merusak[30]. Aspek pemahaman utuh dan persepsi secara eksplisit memberi posisi bagi kebudayaan dalam pembangunan. Terlebih kebudayaan menjadi modal sosial[31] dan dapat difungsikan secara baik dan berimbang bagi kepentingan subjek, termasuk aktor produsen dan perantara budaya yang dalam konteks kebijakan ditugaskan menjadi perancang dan pelaksana kebijakan. Kebudayaan akan menjadi media penyeimbang berbagai kekuatan sosial politik yang ada dalam arus kebijakan. Jika terjadi kekuatan sosial yang tidak berimbang, ia akan menyebabkan kegagalan negara dan (termasuk) pasar untuk mewujudkan kesejahteraan[32].

Pemahaman kebudayaan dilakukan untuk mendukung kebijakan anti kesenjangan dan pro-kesejahteraan. Elaborasi emiknya akan menghantarkan ke pembangunan alternatif yang bertumpu pada keberpihakan dan pemberdayaan. Kemampuan memantik keduanya adalah jembatan emas pembangunan yang menyejahterakan. Dalam kerangka itu, berbagai *input* seperti dana, prasarana, dan sarana yang dialokasikan program perlu ditempatkan sebagai stimulus kegiatan sosial ekonomi. Proses ini adalah paradigma pembangunan alternatif yang berorientasi pada masyarakat, pemberdayaan, partisipasi, dan berkelanjutan[33].

Di Indonesia, pembangunan alternatif tentu disesuaikan dengan konteks masyarakatnya, yaitu mengangkat *virtue ethic* pada kebudayaan untuk kebijakan. Elaborasi kebudayaan lokal dalam kebijakan memungkinkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Pertemuan kebudayaan dengan dimensi emik dan kebijakan dengan dimensi etiknya dapat dijelaskan dan diberi solusi strategisnya melalui pendekatan etnografi *post*-kritis. Dengan pendekatan ini, kebijakan tidak semata bertumpu pada angka dan perspektif deduktif dari logosentrisme evolutif menjadi negara maju. Logos dibalik statistik[34] diubah menjadi cara pandang mengangkat *worldview* dalam melihat kebijakan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kebudayaan tidak akan bersifat artifisial dan komodifikasi sekadar pemberi nilai tambah, tetapi pada nilai substantif. Ia menjadi nilai dan alat kebijakan hingga paradoks pembangunan dan kebudayaan dapat teratasi. Kebudayaan menjadi hidup dan termanfaatkan. Selain itu, pembangunan akan mencapai target kesejahteraan dan keadilan sosial. Kebudayaan lokal menjadi 'kebudayaan universal'[35], di tengah perumusan dan implementasi kebijakan. Dengan etnografi *post*-kritis, logosentrime statistik akan sejajar dengan basis dasar simpati dan empati substantif kualitatif saat menggerakkan kebijakan.

2.2 Mengatasi Kelemahan Etnografi: Suatu Elaborasi

Tiap paradoks kebijakan dan kebudayaan perlu ditengahi agar kebijakan sebagai mekanisme peningkatan kesejahteraan dapat berjalan baik. Perspektif kebudayaan dalam kebijakan selama ini kurang diakomodasi. Padahal secara teoretis dan praktis, ada pendekatan yang mampu memasukkan budaya ke dalam rumusan dan implementasi kebijakan. Logosentrisme kuantitatif statistik deduktif dapat diimbangi dengan perspektif kualitatif induktif yang didasarkan pada pemahaman budaya. Nilai kebudayaan lokal ini perlu didengar dan dinaikkan derajatnya sebagai skenario dan strategi perumusan dan pelaksanaan kebijakan[36].

Salah satu pendekatan atau metode kualitatif induktif itu adalah etnografi. Etnografi berasal dari kata *ethnos* yang berarti 'bangsa' dan *graphein* yang berarti 'gambaran'. Dengan demikian, etnografi adalah gambaran bangsa di suatu tempat dan waktu. Gambaran ini mencakup segala aspek kebudayaan[37], berupa adat, struktur sosial, sistem budaya, bahasa, *world-view*, peralatan, aktivitas, dan gambaran fisik. Etnografi dalam penelitian adalah deskripsi dan analisis tentang masyarakat yang didasarkan pada penelitian lapangan secara langsung dan mendalam[38]. Etnografi menyajikan data budaya bersifat rinci,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

hakiki, dan mendalam. Dalam konteks pembangunan, informasi kebudayaan tersebut dapat menentukan jenis kebutuhan apa yang sesuai dengan dimensi emiknya[39].

Aspek penting etnografi adalah kedalaman dan intensif temuan dan pemahaman tentang orang, organisasi, dan konteks tertentu[40]. Peneliti berada dalam waktu lama sehingga melihat apa yang dilakukan dan merasakan apa yang dialami subjek. Etnografi memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya: (i) pemahaman mendalam, bukan data permukaan; (ii) data dari sumber utama dengan validasi tinggi; (iii) deskripsi yang kaya, spesifik, dan rinci; (iv) interaksi langsung yang berguna bagi langkah lanjutan; dan (v) kemampuan bersosialisasi dengan kelompok budaya *liyan*[41]. Kelemahannya ada pada waktu, cakupan dan subjektivitas. Etnografi membutuhkan waktu lebih lama, baik saat di lapangan maupun saat menganalisis[42]. Kelemahan lain, cakupannya tidak luas karena fokus pada satu kelompok budaya saja. Artinya, peneliti hanya mengarah pada pengetahuan mendalam tentang konteks dan situasi tertentu[43]. Dalam soal subjektivitas, perspektif dapat dipengaruhi peneliti, dan sebaliknya pengaruh budaya subjek juga memengaruhi psikologis peneliti[44].

Kelemahan teknis dapat diatasi dengan penyediaan waktu dan kesiapan peneliti. Hal krusialnya, soal subjektivitas yang membawa bias, mengganggu objektivitas, dan validitas penelitian. Ada representasi subjektif yang berlebihan. Persoalan validitas, reliabilitas, dan objektivitas *normal science* sering dihadapkan pada hasil etnografis yang dianggap subjektif. Bagi etnografer, ada upaya evaluasi proses dan hasil dengan standar tertentu, menguatkan kesejarahan dan budaya serta mencari kekuatan interaktif berbagai aspek kebudayaan. Saat kaitan itu didapatkan, subjektivitas peneliti pun terbatas.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kelebihan dan kekurangan tersebut adalah karakter dari etnografi realisme atau konvensional, sebagaimana dikenalkan Malinowski[45]. Ada tiga ciri etnografi realis, yaitu (i) data bertumpu pada sudut pandang orang ketiga berdasarkan pengamatan partisipan. Peneliti tidak melibatkan refleksi pribadinya dan berupaya bertindak hanya sebagai peliput; (ii) data dipaparkan secara objektif dalam bentuk informasi terukur dan bebas bias, afiliasi politik, dan penilaian personal; (iii) pandangan subjek dituangkan dalam kutipan yang diedit tanpa mengubah makna. Peneliti menyatakan interpretasinya pada akhir laporan. Sifat dasarnya interpretatif peneliti atas subjek budaya. Sekalipun datanya kuat dan mendalam, tetapi etnografi realisme kental dengan "rasa diri" subjeknya. Kelemahan lain, etnografi realis tidak menghubungkan subjek teliti dengan struktur sosial lain, hingga keadaan subjek yang terbatas, terjajah, miskin dan marginal dipotret sebagai mekanisme internal budaya subjek. Dalam posisi tertentu, etnografi realis adalah romantisme dan penggambaran dunia maju atas bangsa yang dianggap kuno[46].

Kelemahan etnografi realis khususnya terkait cakupan luas, rasa diri atau subjektivitas, interpretasi, hubungan sistem sosial *liyan*, dan tujuan inilah yang hendak diatasi oleh studi kasus dan etnografi kritis atau biasa disebut etnografi modern[47]. Studi kasus mencukupkan diri pada subjek dan aspek terbatas sehingga pemahaman lebih fokus daripada etnografi realis. Dalam prosesnya hampir tidak ada perbedaan dengan etnografi realis. Etnografi kritis diciptakan untuk memperjuangkan subjek dari penindasan, pemiskinan, marginalisasi, dan ketidakadilan yang disebabkan struktur dan sistem sosial tertentu, baik internal maupun eksternal[48]. Secara umum memiliki lima ciri, yaitu (i) isu kekuasaan, dominasi, ketidakadilan, represi, hegemoni, dan penindasan sebagai perspektif; (ii) tujuan menghentikan marginalisasi atas subjek dengan cara bekerja sama, partisipasi, negosiasi laporan dengan partisipan, dan memberi bantuan saat

Buku ini tidak diperjualbelikan.

memasuki dan meninggalkan lapangan; (iii) interpretasinya dipengaruhi kebudayaan peneliti; (iv) posisi peneliti sebagai pemberdaya subjek untuk melawan *status quo*. Ada ketidak-objektifan/ketidaknetralan peneliti; dan (v) laporannya variatif, berjenjang, dan kontradiktif karena ada keragaman metode[49].

Dari lima ciri, kelemahannya terletak pada subjektivitas berlebihan peneliti yang memengaruhi data dan interpretasi. Ia memosisikan keadaan subjek sebagai basis perjuangan, tetapi cara memahaminya melalui sudut pandang yang dimiliki peneliti. Hal lain, dimensi emik yang terungkap seolah tidak cacat di hadapan dimensi etik sehingga harus diterima oleh kebijakan. Subjek luar dianggap sebagai pihak bersalah atas keadaan subjek teliti. Kelebihannya, memperjuangkan subjek untuk berdaya dan memiliki akses pembangunan dan keadilan. Tujuan ini selaras dengan pembangunan alternatif sebagaimana misi masyarakat sipil. Sayangnya, metode ini tidak menjadi jembatan emas dalam mengatasi paradoks kebijakan dan kebudayaan karena orientasinya pada dimensi emik yang dipaksakan oleh subjektivitas peneliti berbeda budaya. Hal ini sama artinya dengan menjerumuskan subjek dan kebudayaannya sebagai entitas tidak kompromis atas tujuan baik dari kebijakan pembangunan.

Menilik kelemahan dan kelebihan etnografi realis, studi kasus, dan etnografi kritis, diperlukan hadirnya etnografi yang bertumpu pada objektivitas subjek dan kritisisme dalam memperjuangkan subjek di tengah kebijakan. Pendekatan baru etnografi ini dapat dilabeli dengan terminologi "*Post*-Kritis". Etnografi ini berpijak pada teori relativitas-subjektif Lyotard yang sarat dengan aspek kognisi[50], khususnya simpati dan empati. Ia dapat menjadi jembatan untuk menengahi paradoks kebijakan dan kebudayaan sehingga memantik kesejahteraan subjek. Selain itu, pendekatan ini dapat memberikan ruang bagi negara dalam melaksanakan tanggung jawab dan tujuan bernegaranya. Hal ini terlihat jelas pada aplikasi empat penelitian etnografi.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

III. APLIKASI ETNOGRAFI *POST*-KRITIS

Ibarat hibriditas[51], kebijakan adalah "bentuk kebudayaan baru" yang tercipta oleh kepentingan negara (dan pasar) dan berjumpa dengan kebudayaan lokal. Jika produk kebudayaan lokal tidak terpengaruh kepentingan negara, masyarakat akan sulit berubah. Perlambatan dampak negatif pembangunan pun dapat dilakukan saat produk kebudayaan lokal dapat dikelola baik dan aktif oleh pelaku kebudayaan dan agen pembangunan. Pendekatan etnografi *post*-kritis berperan dalam memetakan tiga dimensi kebijakan, yaitu agen, bahasa, dan teknik politik[52].

Dalam etnografi, membangun hubungan (*rapport*) pada proses bimbang, pengungkapan, kerja sama dan keterlibatan tertuju pada pemahaman yang didasarkan empati dan simpati[53]. Empati, proses mental kompleks yang melibatkan: (i) apa yang dirasakan (afektif); (ii) posisi diri sebagai orang lain (kognitif); dan (iii) menjadi orang yang merasakan (akurasi). Dalam proses empati, ada interaksi antaremosi, perspektif, dan akurasi yang menghasilkan simpati atas subjek[54]. Ada rasa keterlibatan subjek ke realitas sehingga memahami perspektif dan emosi *liyan*, menempatkan diri, dan seolah "menjadi subjek".

3.1 Empati dan Simpati dalam Aspirasi Kebutuhan Pelaku

Salah satu kelompok marginal dalam pembangunan adalah para napi di Lembaga Pemasyarakatan. Secara sosial, mereka hanya dikenalkan dengan kelompok individu dan ditundukkan dengan aturan formal-informal yang ditetapkan *Bapake* (sipir). Ketidakbebasan di ruang sempit melahirkan perilaku abnormal, dan secara sosial membahayakan diri dan orang lain saat bebas. Siksaan fisik dan tekanan psikologis atas individu selama di LP membentuk anomali sosial. Berbagai praktik budaya berkembang mengekalkan hegemoni patron, dan menciptakan abnor-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

malitas[55]. Abnormalitas terjadi akibat keterbatasan napi di ruang sempit. Setiap gerak diawasi oleh sistem *panopticon* (pembentuk bayangan) dari mekanisme informal. Politik 'injak bambu' para *Bapake* memungkinkan pengawasan dan keamanan terpelihara. Namun, praktik ini tidak mengantarkan napi dan 'lulusan penjara' berubah baik sebagaimana tujuan awal sistem LP[56].

Identifikasi masalah sebelumnya adalah pengalaman *live in* penelitian etnografi tiga bulan per tahun di Nusakambangan. Ia ibarat kelompok sosial dengan struktur dan sistem budayanya. Empati dan simpati ke penghuni dan masalahnya akibat hidup di ruang sempit muncul di tengah pemahaman kebijakan negara tentang LP. Dengan sudut *post*-strukturalis semiotika struktur ruang yang dikuatkan data etnografis *post*-kritis tentang sistem patron klien, praktik budaya, pembentukan mental dan persepsi atas ruang, peneliti melakukan relativisme subjektif terhadap kebutuhan subjek (napi) dan piranti LP tentang ruang. Hasil elaborasi itu adalah desain 'penjara tanpa ruangan' yang diujicoba dan ditindaklanjuti hingga kini[57]. Desain ini didasarkan pada dimensi emik napi tentang kebebasan berekspresi pada lahan untuk budi daya pertanian dan produksi. Perwujudan atas ekspresi ini adalah bagian strategi pelaksanaan sekaligus indikator pengawasannya. Setelah ada penilaian kualitatif perubahan perilaku napi ke arah lebih baik dari desain 'penjara tanpa ruangan', mekanisme ini dianggap memenuhi kebutuhan subjek tanpa menafikan tujuan kebijakan pemasyarakatan.

3.2 Emik dan Etik dalam Strategi Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan adalah permasalahan yang tidak mudah dientaskan oleh kebijakan. Berbagai faktor struktural dan kultural menjadi antitesisnya. Orang miskin dianggap kurang mengakses program karena mekanisme sosial dan aturan. Bank *titil*, keterbatasan tanah, dan kompensasi sosial menjadi penyebab kemiskinan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Petani dan nelayan di Rembang kurang mendapat rembesan program, seperti BLT, Raskin, PKH, dan lainnya[58]. Ada juga praktik sosial yang berusaha menahan laju kemiskinan, seperti *ngenger* (ikut orang), *dem-deman* (tanah terpesan), *bagito* (bagi rata), *embung* (bagi air), dan sistem jaringan kekerabatan lain.

Identifikasi kemiskinan dan mekanisme sosial penahan laju kemiskinan diperoleh dari rasa empati dan simpati selama *live in* penelitian etnografi di Rembang. Praktik kebudayaan subjek diteliti untuk identifikasi kebutuhan, sekaligus untuk strategi pelaksanaan, pengawasan, dan tindak lanjut di tengah kebijakan pengentasan kemiskinan. Peneliti menghadirkan pengembangan empat modal budaya yang berperan dalam mengatasi reproduksi kemiskinan[59], yaitu (i) mendorong fungsi patron ke warga miskin. Mekanisme sosialnya diambil dari praktik *ngenger;* (ii) pemanfaatan tanah milik orang kaya atau desa untuk *livelihood system* si miskin. Strateginya diambil dari praktik *dem-deman;* (iii) kebutuhan air bersih, diatasi dengan tata kelola *embung*; dan (iv) ketidakmerataan bantuan diatasi dengan sistem *bagito*, yaitu model pembagian makanan saat di sawah dan siklus kehidupan[60]. Penerjemahan praktik budaya ke kebijakan dilakukan dengan mengelaborasi subjektivitas dari masyarakat dan perangkat unit pengelola kegiatan sebagai aktor kebijakan. Setelah mekanisme modal budaya beserta teknis pelaksanaan dan skenario tindak lanjut disepakati atas pertimbangan emik dan etik kebijakan, ia dikomunikasikan ke masyarakat luas, diujicobakan oleh UPK, dan diangkat ke Musrenbang[61]. Akhirnya, ia menjadi strategi penguatan kelembagaan sosial tradisi dalam mengatasi kemiskinan.

3.3 Elaborasi Aksi dan Sakralitas: Mekanisme Evaluasi

"Hutan ini seolah tanpa batas. Liukan gunung tak menunjukkan tanda di mana orang Taa tinggal". Penelitian etnografi pengobatan Tau Taa Vana di pedalaman Tojo Una-una mengantarkan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

peneliti pada posisi memperjuangkan nasib, ulayat, dan klaim akses ekonomi dan kebudayaan[62]. Masalah sosial penambangan emas, penyerobotan tanah, dan perusakan *Kaju Marangka'a* sebagai hutan sakral leluhur[63], ditemukan sebagai bagian identifikasi masalah. Empati dan simpati hadir bersama saat *live in*. Di tengah derap pembangunan, masih ada warga negara yang hidup penuh keterbatasan dan dikorbankan untuk dan atas nama negara. Pembangunan jalan trans Sulawesi Tojo-Morowali akan melintasi hutan leluhur *Kaju Marangka'a*.

Seiring penelitian pengobatan[64], perekaman kebutuhan hadirnya negara di tengah peningkatan kesejahteraan tanpa menghilangkan nilai sakralnya, dirumuskan dengan beberapa kali *mogombo* (kesepakatan). Setelah rumusan itu disepakati dengan mempertimbangkan berbagai kemampuan dan nilai budayanya, peneliti mengelaborasi rumusan emik itu dengan etik kebijakan terkait pembangunan wilayah komunitas adat terpencil. Konsepsi *givu ada bayar* (sanksi adat) menjadi mekanisme negosiasi dan elaborasi usulan dan evaluasi. Tujuannya, untuk menguatkan daya tahan subjek dan menjadi alat negosiasi di hadapan *liyan*. Rumusan itu dibicarakan dengan masyarakat transmigran dan perangkat pemerintah untuk penyelesaian konflik tanah ladang ataupun jalan trans Sulawesi. Beberapa aspek terkait penjagaan nilai sosial budaya dan *livelihood system* subjek Tau Taa Vana berhasil disepakati. Bahkan, pemerintah menyetujui pengalihan rencana rute pembangunan jalan Trans Sulawesi dari lintasan *Kaju Marangka'a* ke Lengkasa yang dikhususkan sebagai *lipu* (wilayah) permukiman dan produksi. *Givu ada bayar* menjadi mekanisme penting pelaksanaan, pengawasan, dan skenario tindak lanjut. Terkait pemertahanan budaya termasuk praktik pengobatan dan perlindungan kekayaan bahan obat, Pemerintah Daerah Tojo Una-una mengeluarkan Peraturan Daerah Perlindungan Komunitas Adat No18/Perda/VIII/2013[65].

Buku ini tidak diperjualbelikan.

3.4 Rumusan Pendampingan dalam Pemajuan Kebudayaan

Kelestarian bahasa budaya kelompok Kafoa di Alor terancam kebijakan pengembangan bahasa nasional. Hilangnya bahasa daerah berarti hilangnya budaya. *Woum* (pepatah) dan upacara adalah dua praktik budaya yang terancam[66]. Belum lagi *virtue ethic* yang memiliki kekuatan bagi pelaku budaya. Pepatah "*Yi dika yi balai dewaway, way gabang tahu oho, yaka go ma ruah go pidey"* (kita keluarga, jangan pukul, karena semua satu nenek), membangun praktik hidup harmoni. Hal ini dikuatkan "Jika orang Islam membangun masjid, Kristen yang membangun fondasi. Jika orang Kristen membangun gereja, Muslim meletakkan fondasinya" dan "Jika gunung runtuh, dua gereja menjadi benteng bagi dua masjid. Jika air laut naik, dua masjid menjadi benteng dua gereja"[67].

Diawali empati dan simpati ke pengguna bahasa Kafoa yang terlampau miskin, saat itu niat mendampingi pemajuan budaya dan kehidupan muncul. Setelah empat tahun penelitian etnografi yang dibuktikan dengan buku, jurnal, modul, *policy brief*, dan film, sebagai rekaman permasalahan dan analisis kebutuhan, diteruskan ke pemerintah. Rumusan ini dibicarakan dengan tokoh adat sehingga mekanisme dan teknis pelaksanaan, pengawasan dan skenario tindak lanjut yang tidak bertabrakan dengan kebijakan ditetapkan. Pendampingan penyusunan aturan daerah pemajuan budaya dilakukan dengan aktif. Pemilihan Dinas Pendidikan sebagai mitra kegiatan sangat strategis. Setelah pertemuan dan sidang secara intens, Peraturan Daerah No. 25/PERDA/IV/2016 keluar dan disambut gembira masyarakat Kafoa di Probur Utara. Hingga kini, modul ajar bahasa lokal setempat Kafoa yang dicetak ribuan eksemplar atas nama LIPI tetap diajarkan pada jenjang SD dan SMP seluruh Kabupaten Alor[68]. Sistem pembelajarannya diawasi dan didampingi langsung para tetua adat dan Dinas Pendidikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

IV. ETNOGRAFI *POST*-KRITIS: KONTRIBUSI TEORETIS PENDEKATAN BARU

Dalam konteks paradoks kebijakan dan kebudayaan, etnografi *post*-kritis dapat menjadi piranti mempertemukan keduanya. Hal ini tecermin dari empat penelitian seperti dipaparkan sebelumnya. Etnografi ini dilandaskan pada perspektif *post*-modernisme, khususnya teori relativisme-subjektif. Relativisme diartikan sebagai pandangan atas nilai dan norma kognitif, estetika tergantung pada sistem sosial atau konseptual subjek. Dua aspek kognitif, simpati dan empati dapat disebut *drinking problem,* sebagaimana istilah Handwerker[69]. Keduanya dapat memantik subjektivitas dan melahirkan kesadaran kritis peneliti dan para pihak. Relativisme bukan doktrin, melainkan konsepsi yang ditekankan dari pengalaman, pikiran, dan evaluasi bersifat relatif. Dasar relativisme adalah filsafat yang tidak mengakui nilai absolut. Ia adalah antitesis rasionalisme yang menekankan akal sebagai sumber pengetahuannya[70].

Pendekatan etnografi *post*-kritis hakikatnya menjadikan kebudayaan lokal dengan dimensi emik dan kebijakan dengan dimensi etiknya tetap berada pada tataran subjektivitasnya. Demikian juga para peneliti yang akan melihat dua sisi berbeda itu. Masing-masing memiliki kepentingan subjektif yang bisa dipertemukan atau dinegosiasikan. Terlebih aktor pada dua sisi berbeda tetap individu yang terikat subjektivitas, dan peneliti pun memiliki subjektivitasnya. Keadaan ini senada dengan pernyataan Schuon bahwa aksioma relativisme adalah individu yang tidak bisa lepas dari subjektivitas[71]. Dalam kajian budaya, tiap budaya memiliki cara pandang masing-masing tentang dunia[72]. Artinya, subjek penerima manfaat, aktor kebijakan, dan peneliti pun memiliki subjektivitasnya. Dalam etnografi *post*-kritis, tiga

Buku ini tidak diperjualbelikan.

aktor bersama merelatif-subjektivitasnya agar semua kepentingan bisa terakomodasi dengan baik. Kepentingan itu mencakup (i) *virtue ethic* kebudayaan diangkat sebagai bagian kebijakan; (ii) nilai, misi, dan tujuan kebijakan dapat diterapkan, dan (iii) peneliti mendorong subjek mendapatkan akses pembangunan dan bahkan ia menjadi mediator dari capaian tujuan kebijakan.

Etnografi *post*-kritis tidak semata mengutamakan kelompok subjek, tetapi juga ada kemauan dan kemampuan mempertemukan kepentingan subjek yang memiliki dimensi emik dengan kebijakan yang memiliki dimensi etik. Etnografi *post*-kritis mendorong peneliti memperjuangkan subjek dengan subjektivitas melalui empati dan simpati, dan membawanya pada celah advokasi dan pemberdayaan berdasar *virtue ethic* yang ada. Tidak berhenti pada dimensi emiknya, analisis mendalam atas hegemoni struktural dan politik dari kebijakan pun dipahami secara mendalam, dan dicari titik lemah ataupun celah yang memungkinkan dimensi emik dapat memasukinya.

Peneliti etnografi *post*-kritis berdiri pada kesadaran bahwa kebijakan sarat dengan dimensi etik serta cara berpikir yang deduktif dan umum sehingga langkah penelitiannya harus berada di garda terdepan untuk memberi masukan perumusan kebijakan, khususnya analisis kebutuhan subjek dan potensi emik pada kebijakan. Ia pun harus tetap berada di garda tengah, sebagai pemberi solusi implementasi kebijakan berdasarkan mekanisme internal subjek. Terakhir, ia pun terlibat aktif pada garda akhir, yaitu evaluasi dan usulan tindak lanjut kebijakan. Penebalan empati dan simpati atas subjek dan komprominya dengan kebijakan berlangsung selama berada di tiga garda itu.

Tujuan penelitiannya yaitu menjaga subjek dari ketidakadilan dan agar mendapat akses pembangunan sekaligus mengawal kebijakan *pro-poor* yang sesuai dengan jati diri subjek. Sementara

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sisi tengah sebagai bentuk *relativism* subjektivitasnya, peneliti menjalankan visi ilmu pengetahuan, terlibat kebijakan dan pemberdayaan. Praktik ini menempatkan etnografi *post*-kritis mampu mengatasi paradoks pembangunan dan kebudayaan yang selama ini menghantui hubungan antara negara dan warga negaranya. Etnografi *post*-kritis berangkat dari tanggung jawab etis dalam mengurus proses yang tidak layak ada atau ketidakadilan, tanpa harus meninggalkan tanggung jawab emiknya terhadap subjek dan karakter dirinya sebagai peneliti.

Subjektivitas peneliti, baik berasal dari atau menimbulkan empati dan simpati itu penting, bahkan menjadi nilai lebih dari etnografi *post*-kritis. Keduanya diperoleh dari praktik etnografi, yaitu tinggal bersama untuk memahami *situated knowledge* subjek[73]. Empati dan simpati juga menjadi dasar perjuangan terhadap subjek di tengah kebijakan. Keberadaannya menjadi otoritas etnografis yang memantik perhatian aktor kebijakan sehingga peduli dan menyesuaikan kebijakan sesuai kebutuhan subjek[74]. Subjektivitas peneliti mengarah pada kritisisme yang mengangkat keterbatasan subjek. Konsep 'mengangkat subjek' tanpa meninggalkan kebijakan dalam tulisan advokasi, pendampingan, dan intervensi akan menjadi karakter utama dari pendekatan atau metode etnografi *post*-kritis.

Dengan demikian, subjektivitas peneliti direlatifkan saat berhadapan dengan *liyan* dalam bentuk kebijakan dan aktornya untuk diakomodasi subjek teliti. Ujungnya, memperjuangkan subjek agar mendapat keadilan dan kesetaraan, tanpa harus melakukan perlawanan frontal ke *liyan*. Perjuangannya lahir dari subjektivitas yang berakar dari empati dan simpati walaupun prosesnya tetap pada relativisme-subjektivitas. Etnografi *post*-kritis adalah tawaran pendekatan atau disiplin baru dengan karakter 'penelitian perjuangan subjek yang menggandeng *liyan'*. Etnografi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

ini menunjukkan paradigma pada aspek tujuan. Kelahirannya berbeda dengan etnografi digital dan bentuk lainnya. Etnografi *post*-kritis menjadikan isu kontemporer, subjek komunitas dan non-komunitas seperti komunitas adat, marginal, minoritas, pengobatan, bahasa, kemiskinan, kuliner, bencana[75], dan lainnya menjadi pintu masuk penelitian[76].

Secara keseluruhan, prinsip dasar pendekatan etnografi *post*-kritis adalah menghadirkan empati dan simpati yang kuat dalam proses penelitian, sejak membangun *rapport* sampai akhir kebersamaan dengan subjek, khususnya saat berhadapan dengan *liyan*. Relativitas subjektivitas empati dan simpati yang ada dikapitalisasi aktif dalam mengatasi paradoks internal kebudayaan ataupun paradoks eksternal dengan *liyan* seperti kebijakan dan program. Sementara itu, unsur utama pendekatan *post*-kritis, yaitu (i) pemahaman mendalam atas hibriditas dari substansi subjek. Unsur ini didasarkan pada *axioma* bahwa kebudayaan apapun mengalami dinamikanya. Salah satu proses dinamika budaya adalah hibriditas[77], dan produk kebudayaan yang dihasilkannya adalah produk hibrid[78]. Artinya, peneliti memiliki pemahaman mendalam terkait sejarah dan proses suatu kebudayaan yang memiliki dimensi emik atau etik bagi kebudayaan formal. Keduanya memiliki karakter hibriditas atau keduanya saling berjumpa, bernegosiasi, berdialog, dan menemukan puncak yang dianggap baik dan menjawab kepentingan subjek; (ii) menghadirkan dan menguatkan aspek kognisi sehingga kepekaan dan kepedulian peneliti atas subjek internal (masyarakat) dan subjek eksternal (aktor kebijakan) dapat terpahami dengan baik. Tekanan utama aspek kognisi ini adalah pada empati dan simpati subjektif yang terelatifkan dan tetap bertumpu pada kepentingan subjek kebudayaan internal. Empati dan simpati hadir pada tiga proses kedekatan dengan subjek, yaitu saat *attention* (perhatian gejala awal), *encoding*

Buku ini tidak diperjualbelikan.

(perekaman-internalisasi gejala), dan *retrieval* (pembanding/ penceritaan)[79]; dan (iii) ikhtiar memperjuangkan subjek dan mengelaborasi *liyan* dalam kepentingan subjek. Unsur ketiga ini adalah karakter etnografi kritis. Sayangnya, ia dipenuhi jiwa pembangkangan atas *status quo* dan dimensi etik. Sementara itu, etnografi *post*-kritis berusaha menghadirkan *liyan* sesuai dengan dimensi emik, atau sebaliknya. Tiga unsur utama ini menjadi pembeda dari dua pendekatan etnografi lainnya.

Proses implementasinya hampir sama pada tahapan etnografi umum, yaitu (i) mengidentifikasi tujuan dan tipe rancangan sesuai masalah riset; (ii) membicarakan persetujuan dan akses; (iii) menggunakan prosedur pengumpulan data yang tepat dan sarat dalam membangun hubungan dengan subjek (*rapport*); (iv) menganalisis dan menginterpretasi data sesuai temuan *grounded*; dan (v) menyusun laporan sesuai rancangan[80]. Hal yang membedakan adalah pada setiap tahapan itu disertai penebalan kognisi sosial peneliti berupa empati dan simpati yang direlatifkan subjektivitasnya. Caranya adalah dengan memiliki kepedulian atas subjek, yaitu mengangkat dimensi emik sebagai kekuatan utama. Namun, di sisi lain, ia memiliki kekuatan negosiasi ketika berhadapan dengan *liyan*.

Akhirnya, dengan pendekatan baru ini, peneliti dapat secara maksimal menjadi mediator dari capaian tujuan kebijakan dengan harapan emik kelompok subjek telitinya. Produksi pengetahuan berimbas praktis seperti itu hanya didapatkan dari pendekatan dan praktik etnografi *post*-kritis. Tidak hanya itu, intervensi budaya yang menguatkan subjek tanpa meninggalkan *liyan* pun menjadi bagian tidak terpisahkan dari keunggulan pendekatan baru ini.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

V. MENENGAHI PARADOKS KEBIJAKAN: KONTRIBUSI PRAKSIS PEMBANGUNAN

Dalam konteks pembangunan, pendekatan etnografi *post*-kritis dapat berkontribusi praktis bagi upaya mengelaborasi "visi, produk, dan aktor" yang berbeda dan dapat menjembatani paradoks kebijakan dan kebudayaan lokal. Pendekatan ini dapat menengahi tiga kemungkinan, yaitu (i) kebijakan akan masuk sebagai mekanisme produk kebudayaan lokal sehingga masyarakat akan menerima dan mendukung kebijakan yang ada. Jika kebijakan telah menjadi bagian dari dimensi emiknya, mekanismenya akan sesuai dengan piranti sosial budayanya; (ii) produk kebudayaan lokal dapat mengakomodasi kebijakan, dalam hal ini dapat tumbuhnya suatu produk budaya hibrid. Sekalipun dianggap berbeda, kepentingan dan tujuan dari kebijakan akan diadopsi dan diadaptasi oleh kebudayaan; dan (iii) produk kebudayaan tidak terpengaruh oleh kebijakan. Keduanya seolah berjalan masing-masing, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga masyarakat atau kelompok targetnya untuk mengakses pembangunan. Semuanya berujung pada kepentingan subjek di tengah visi dan misi pembangunan.

Dalam konteks ini, pemangku kepentingan, khususnya pemerintah, pekerja sosial, dan fasilitator kebijakan dan program berusaha merelatifkan subjektivitasnya agar semua kepentingan dapat terakomodasi dengan baik. Kepentingan itu mencakup (i) *virtue ethic* kebudayaan lokal yang diangkat sebagai bagian kebijakan; (ii) misi dan tujuan kebijakan dapat diterapkan, dan (iii) mendorong masyarakat, khususnya kelompok marginal, rentan dan miskin untuk mendapat akses pembangunan. Cakupan itu dapat diterjemahkan ke dalam proses identifikasi kebutuhan, strategi pelaksanaan, pengawasan implementasi, dan skenario pembangunan berkelanjutan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

VI. KESIMPULAN

Penelitian adalah sarana penting perumusan dan penetapan dasar-dasar implementasi kebijakan dan program pembangunan yang menyejahterakan masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, empat tujuan negara Indonesia diharapkan akan tercapai. Orasi ini berusaha mengaitkan paradoks kebijakan dan kebudayaan yang dihadapi oleh negara meskipun ada beberapa kelemahan dari pendekatan etnografi. Namun, pendekatan ini adalah satu pendekatan strategis dalam menyodorkan data emik kualitatif induktif yang memadai bagi arah pembangunan. Berdasarkan dua kenyataan itu, orasi ini berada pada dua tataran, yaitu (i) etnografi *post*-kritis sebagai tawaran pendekatan baru, dan (ii) upaya membangun jembatan emas untuk menengahi paradoks kebijakan dan kebudayaan.

Karena sejumlah kelemahan, pendekatan etnografi realis dan kritis saat ini perlu direvitalisasi. Etnografi *post*-kritis diajukan sebagai pendekatan baru yang ditengarai lebih tepat dan kontekstual difungsikan sebagai "jembatan emas" atau "representasi hibriditas" dalam mengatasi paradoks kebijakan dan kebudayaan pada masa kini. Secara konseptual, nilai pembeda (*discriminating value*) etnografi *post*-kiritis dibandingkan etnografi lain terletak pada upaya mengangkat perspektif emik berbasiskan kebudayaan lokal di tengah tujuan dan pemahaman etik. Ia berusaha mengatasi paradoks internal dan eksternal kebudayaan diri atau saat berhadapan dengan *liyan,* dengan serangkaian upaya relativisme subjektif. Elaborasi ini dapat masuk ke dalam bahasa teknis kebijakan. Untuk tujuan itu, pendekatan etnografi *post*-kritis menekankan pentingnya empati dan simpati dalam proses penelitian dan pendampingan. Dalam kapasitas ini, peneliti bertindak sebagai mediator kepentingan kelompok subjek dengan pemangku kepentingan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

VII. PENUTUP

Etnografi realis dan kritis adalah metode dan pendekatan dalam tradisi antropologi. Namun, keduanya memiliki kelemahan dan kelebihan, khususnya saat dihadapkan pada isu kebijakan dan dimensi etiknya. Elaborasi keduanya menghasilkan paradigma etnografi *post*-kritis yang bertumpu pada relativisme subjektif yang memanfaatkan empati dan simpati. Tujuannya untuk memantik budaya menuju kebijakan. Desain ini merupakan satu karakter kajian budaya yang bertumpu pada pendekatan *post*-modern yang tidak menghendaki makna artifisial. Etnografi *post*-kritis dapat menjadi paradigma baru kajian budaya dalam menjawab persoalan pemahaman budaya di tengah derap pembangunan.

Saat paradoks kebijakan dan kebudayaan menyebabkan kemiskinan, marginalitas, dan eksklusi sosial dalam posisi ilmuwan kajian budaya, dapat dinyatakan bahwa etnografi *post*-kritis yang kental dengan perspektif kajian budaya bertumpu pada kekuatan kualitatif untuk mendapatkan makna struktur pengalaman subjek atas paradoks kebijakan dan kebudayaan. Pemahaman mendalam tersebut didasarkan pada berpikir dinamis, kritis, plural, kontekstual, lokal, dan tidak linear-statis. Dalam konteks pembangunan, etnografi *post*-kritis mempertemukan dimensi etik kebijakan dan dimensi emik kebudayaan. Pertemuan keduanya diibaratkan sebagai produk hibrid pada fenomena representasi hibriditas, yang memungkinkan hadirnya silang budaya dan proses penerimaan yang memiliki budaya berbeda.

Kolaborasi etnografi dari tradisi antropologi dan kajian budaya yang sarat kritisisme sekaligus menjadi etnografi *post*-kritis, berguna bagi kepentingan penelitian untuk ilmu pengetahuan, kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat. Harapannya, peneliti dapat hadir di tengah masyarakat dan menjadi agen pencapaian empat tujuan bernegara pada masa sekarang dan yang akan datang.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirabbilalamiin, segala puji bagi-Mu ya Allah, saya panjatkan untuk mensyukuri pencapaian akademik ini. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang berjasa dalam proses ini. *Pertama,* saya ucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo atas penetapan saya sebagai Peneliti Ahli Utama; Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Dr. Laksana Tri Handoko, M.Sc.; Ketua Majelis Pengukuhan Profesor Riset, Prof. Dr. Ir. Bambang Subiyanto, M.Agr.; Sekretaris Majelis Pengukuhan, Prof. Dr. Ir. Gadis Sri Haryani, D.E.A.; Tim Penelaah Naskah Orasi ilmiah, Prof. Dr. Meutia Farida Hatta Swasono, Prof. Dr. Yekti Maunati, M.A., dan terlebih kepada Prof. Dr. Syarif Hidayat sehingga naskah ini layak diorasikan; serta panitia pelaksana pengukuhan yang telah menyelenggarakan pengukuhan profesor riset ini.

Terima kasih juga saya sampaikan kepada Deputi Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan, Prof. Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, M.A.; Sekretaris Utama LIPI, Rr. Nur Tri Aries Suestiningtyas, M.A.; Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Dr. Sri Sunarti Purwaningsih, M.A.; dan Kepala BOSDM LIPI, Dr. Heru Santoso, M.App.Sc. Penghargaan tinggi juga disampaikan kepada Dr. Cahyo Pamungkas, M.A., kolega yang membaca draf orasi.

Kedua, kepada para guru, Prof. Dr. Taufik Abdullah, M.A., Prof. Dr. H. Muhamad Hisyam, M.A., Dr. Ignas Kleden, Dr. Ninuk Kleden-Probonegoro, Dr. Muhammad A.S. Hikam, M.A., Prof. Dr. Thamrin Amal Tomagola, M.A., Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah, M.A., Pdt. Prof. Dr. Bernard Adeney T. Risakotta, Dr. St. Sunardi, Romo Dr. Harry Priyono, dan Romo Dr. Budi Subanar. Tak lupa kepada para guru lintas negara, Prof. Dr. Robert Cribb, Prof. Dr. Fridus Steijlen, Prof. Dr. Anton Lucas, dan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Prof. Dr. Thomas Linblad, berkat ilmunya sehingga mengantarkan saya pada kolaborasi penelitian lintas disiplin.

Ketiga, para sahabat yang terus mendukung kehidupan dan jejak karier akademik, Pdt. J. Victor Rembeth, M.A., M.Div., Dr. Puji Winarni A.S. Hikam, M.A., Dr. Els Bogaert (Direktur *Netherland Institute voor Oorlog Documentatie*), Dr. Khoirul Himmi Setiawan, Adhis Tessa, Sri Astutik, M.Si., Ibnu Nadzir Daraini, M.Sc., Franciscus Welirang (Direktur PT Indofood), dan Siek Angling Saputra Sanjaya (Pemilik Bakpia Pathok 25). Terima kasih kepada para rekan di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan dan lembaga lain; Abdul Rachman Patji, M.A., Prof. Dr. Dwi Purwoko, Dr. Thung Ju Lan, M.A., Dr. Widjajanti, M.Lith., Drs. Sudiyono, Usman, M.A., Tedi Setiadi, M.M., Jalu Lintang, Rusydan Fathy, Luis Feneteruma, Gustaf Wijaya, dan Ardanareswari Ayu Pitaloka.

Keempat, saya berterima kasih kepada keluarga, Uswatun Hasanah, S.Th.I. dengan kekuatannya terus memberi yang terbaik. Untuk anakku, Lautan Hesychia Hayes Usha, Aliena Anaqu Arung Pasisir, dan Merha Ihsha Lembayung Bumi, kalian adalah kebahagiaan yang memberi jejak hidup dan jalan ilmu pengetahuan. Terima kasih tulus kepada kedua orang tua, H. Ma'mun Alie dan Hj. Tusrinah. Demikian juga kepada mertua, H. Hamza dan Hj. Masdura di Pulau Bawean. Kepada para saudara dan ipar, Ang In, Ang On, Ang Ui, Mas Usin, Mas Imam, Uun, Zulkarnain, Khoiruzzaman, dan Khoirunnufus.

Terakhir, saya sampaikan terima kasih kepada Majelis Profesor Riset dan para hadirin yang dengan saksama bersedia mengikuti acara pengukuhan ini.

Akhirul kalam, Wabillahittaufikwalhidayah

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Buku ini tidak diperjualbelikan.

DAFTAR PUSTAKA

1. **Humaedi MA**. Pembentukan praktik budaya naluri dalam Kristenisasi Kiai Sadrach. Jurnal Patrawidya: Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya. 2013;14(4):615–636.
2. **Humaedi MA**. Etnografi bencana II: menakar peran para pemimpin lokal dalam pengurangan risiko bencana. Yogyakarta: LIPI & LKiS; 2017.
3. BPS. Pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) kemiskinan; 2019 [Diunduh pada 15 Oktober 2019]. https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html.
4. Amady MRE. Emik dan etik pada karya etnografi. Jantro: Jurnal Antropologi dan Isu-isu Sosial. 2014;16(20):167–189.
5. Neuman LW. Social research methods: qualitative and quantitative approaches. New York: Pearson; 2014. 69–76.
6. **Humaedi MA**, editor. Serumpun berbeda batang: studi etnografi masyarakat perbatasan Sebatik. Yogyakarta: Valia Pustaka; 2012. 185–228.
7. Stokes S, Thad D, Marcelo N, Valeria B. Brokers, voters, and clientelism: the puzzle of distributive politics. New York: Cambridge University Press; 2013. 114–119.
8. Sutisna A. Memilih gubernur, bukan bandit! demokrasi elektoral dan pilgub 2017 di tanah jawara. Yogyakarta: Deepublish; 2017. 18–24.
9. **Humaedi MA**. Karakter sosial budaya 'atas dan bawah' masyarakat penutur bahasa Kafoa. Jurnal Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional. 2012;19(1):95–112.
10. Keraf AS, Mikhail D. Ilmu pengetahuan sebuah tinjauan filosofis. Yogyakarta: Kanisius; 2001. 79–88.
11. Thompson M. Some basic notes on virtue ethics. Routledge online publication; 2010.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

12. **Humaedi MA**. Budaya ketahanan pangan masyarakat Pulau Bawean. Dalam: Humaedi MA, editor. Strategi bertahan hidup: studi etnografi budaya masyarakat Pulau Bawean. Jakarta: LIPI Press; 2010. 87–129.

13. **Humaedi MA**. Perubahan nilai-nilai budaya masyarakat Aceh pasca bencana tsunami. Jurnal Patrawidya: Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya. 2014;15(4):561–584.

14. Kementerian Keuangan RI. Nota keuangan beserta anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2018. Jakarta: Kementerian Keuangan; 2018 [Diunduh pada 12 Juli 2019]. http://m.detik.com/finance/ berita-ekonomi-bisnis/d-3642762.

15. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pencapaian pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)/ sustainable development goals (SDGs). Jakarta: Kementerian PPR/Bappenas; 2018.

16. **Humaedi MA**, Abdul RP, Bayu S, Sudiyono, Anggy DS. Belajar persatuan dari perbatasan. Jakarta: LIPI Press; 2020.

17. **Humaedi MA**. Merajut keindonesiaan kita. Dalam: Hikam MAS, editor. Menyongsong 2014–2019 memperkuat Indonesia dalam dunia yang berubah. Jakarta: Dewan Analis Strategis Badan Intelijen Negara & Rumah Buku. 2014. 111–178.

18. **Humaedi MA**. Merajut tradisi humaniora Timur dan Barat. Jurnal Masyarakat dan Budaya. 2008;10(2):67–84.

19. **Humaedi MA**. Kerusuhan Sampang: kontestasi aliran keagamaan dalam wajah kebudayaan Madura. Jurnal Harmoni. 2014;13(2):117–133.

20. Hidayat S. "Shadow state? bisnis dan politik di Provinsi Banten" dalam HS Nordholt & G van Klinken (eds). Politik lokal di Indonesia. Jakarta: KITLV-Yayasan Obor Indonesia; 2007. 127–131.

21. Kleden-Probonegoro N, **Humaedi MA**. Etnografi kemiskinan I: segoro & negoro (kemiskinan dari perspektif kebudayaan). Jakarta: LIPI Press; 2010.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

22. Brundin E. Triple helix networks in a multicultural context: triggers and barriers for fostering growth and sustainability. Journal of Development Entrepreneurship 2008;13(1):77–98.

23. Katz SM. A system approach to development administration: a framework for analysing capability of action for national development. Washington D.C: Pharos; 1999. 14–19.

24. Rostow WW. The stages of economic growth: a non communist manifesto. New York: Cambridge University Press 1990. 12–28.

25. Sen A. Inequality reexamined. Harvard: Harvard University Press; 1992.

26. Calvert P. Susan C. Politic and society in the third world. England: Longmann Education; 2001.

27. Van Uppord PQ, Ananta KG, editor. A moral ciritique of development: in search global responsibilities. London: Routledge; 2005.

28. Shively DH, editor. Tradition and modernization in Japanese culture. Princeton: Princeton University Press; 1971.

29. Schramm W, Roberts DF (eds.). The process and effects of mass communication. Urbana, III.: University of Illinois Press, 1971.

30. Budiman A. Teori pembangunan dunia ketiga. Jakarta: Gramedia; 1996.

31. **Humaedi MA**. Akomodasi budaya dalam implementasi program pengentasan kemiskinan di pedesaan: studi kasus di Kecamatan Kaliori Rembang Jawa Tengah. Jurnal Kajian: Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan. 2012;17(1):129–157.

32. Edelman MAH. Introduction: the anthropology of development and globalization. Dalam: Edelman M, Haugerud A, editor. The anthropology of development and globalization: from classical political economy to contemporary neoliberalism. Malden, MA: Blackwell; 2005. i–xiv.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

33. Chambers R. Poverty and livelihoods: whose reality counts? Dalam: Kirdar U, Silk L, editor. People: from impoverishment to empowerment. New York: New York University Press; 1995.

34. Foucault M. Pengetahuan dan metode: karya-karya penting Foucault. P Rabinow, terjemahan. Aesthetics, method and epistemology: essential works of Foucault 1954–1984. Yogyakarta: Jalasutra; 2002. 35–43.

35. Agusta I. Indonesia dalam pertautan budaya pembangunan dan budaya warga desa. Wacana. 2007;9(2):135–153.

36. **Humaedi MA**. Disaster management based on the perspective of inter-religious connection and local wisdom. Analisa: Journal of Social Science and Religion. 2015;22(2):213–226.

37. **Humaedi MA**, Koswara VD. Profil ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan 2005–2009. Jakarta: Asisten Deputi Urusan Perkembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan Kementrian Negara Riset dan Teknologi RI; 2009.

38. Cresswell JW. Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Fourth edition. New Jersey: Person Education, Inc.; 2012, 47–82.

39. **Humaedi MA**, Hisyam M, Seftiani S, Rembeth JV. Efektivitas peran kepemimpinan lokal dalam upaya pengurangan risiko bencana. Dalam: Harjono H, editor. Prosiding pemaparan hasil penelitian geoteknologi LIPI tentang ilmu kebumian untuk kehidupan yang lebih baik. Bandung: Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI; 2013. 51.

40. **Humaedi MA**. Pendidikan integral keilmuan keagamaan dan konteks sosial kebudayaan dalam menjawab isu-isu kontemporer. Edukasi: Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama dan Keagamaan. 2013;11(3):305–318.

41. Spradley JP. The ethnographic interview. Fort Worth, Tex: Harcourt Brace Jovanovich College Publisher; 1979.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

42. **Humaedi MA**. Islam dan Kristen di pedesaan Jawa. Jakarta: Rumah Buku & Kementerian Agama; 2008. 45.

43. Cresswell JW. Research design: pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2016. 85–90.

44. **Humaedi MA**. Khayali tradisi di tengah realitas: pandangan ilmu magis orang Dayak. Dalam: Patji AR, editor. Etnisitas & pandangan hidup komunitas suku bangsa di Indonesia: bunga rampai kedua studi etnisitas di Sulawesi Tengah dan Kalimantan Selatan. Jakarta: LIPI Press; 2010. 103–164.

45. Malinowski, B. A scientific theory of culture and other essays. New York: A Galaxy Book;1966:134–152.

46. **Humaedi MA**. Penelitian etnografi di balik pencegahan konflik dan affirmative action perlindungan kekayaan budaya: memahami sebuah hibriditas kebudayaan. Jurnal Masyarakat dan Budaya. 2018;19(3):447–468.

47. **Humaedi MA**. Modernitas dalam celah-celah tradisi: mengurai etnisitas dan pandangan hidup suku bangsa di Indonesia. Dalam: Patji AR, editor. Etnisitas & pandangan hidup komunitas suku bangsa di Indonesia: bunga rampai kedua studi etnisitas di Sulawesi Tengah dan Kalimantan Selatan. Jakarta: LIPI Press; 2010. 1–21.

48. Quijano A. Coloniality of power, Eurocentrism and Latin America. Nepantla: Views from South. 2000;1(3):533–580.

49. Madison DS. Critical ethnography: method, ethics, and performance. London: SAGE Publications 2005. 1–264.

50. Mignolo WD. Epistemic disobedience, independent thought and decolonial freedom. Journal of Theory, Culture & Society. 2009;26(7–8):159–181.

51. Venn C. The postcolonial challenge: towards alternative worlds. London: Sage; 2006. 159–181.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

52. Kleden-Probonegoro N, **Humaedi MA**. Etnografi kemiskinan II: lembaga tradisi (antara eksistensi & reproduksi kemiskinan). Jakarta: LIPI Press; 2010.

53. Emerson RM, Fretz RI, Shaw LL. Writing ethnographic fieldnotes. Chicago, IL: The University of Chicago Press; 2011.

54. O‟ Hara M. Cultivating consciousness: Carl R. Rogers's person-centered group process as transformative androgogy. Journal of Transformative Education. 2003;1(1):64.

55. **Humaedi MA**, Pratomo YP, Sianturi RR. Pemenjaraan: (Pe(ab) normalan Budaya? Jurnal Masyarakat Budaya. 2005;7(2):19–42.

56. **Humaedi MA**. Pemenjaraan: penormalan budaya dan kegagalan pembangunan karakter. Jurnal Sosiologi Pendidikan. 2012;1(1):35–47.

57. **Humaedi MA**. Desain penjara tanpa ruang: narapidana dan asimilasi. Memo kebijakan untuk Kementerian Hukum dan HAM; 2006. 1–8.

58. **Humaedi MA**. Jeragan nemen: dinamika hubungan bakul-langgan dalam perspektif politik-ekonomi. Jurnal Masyarakat Indonesia. 2010;36(2):125–156.

59. **Humaedi MA**. Mematahkan pewarisan kemiskinan. Jurnal Masyarakat dan Budaya. 2011;13(3):83–110.

60. **Humaedi MA**. Proses alih status sosial melalui tradisi demdeman (plakat waris) dan ngenger (ikut keluarga). Jurnal Patrawidya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya. 2013;14(1):31–52.

61. **Humaedi MA,** Zulfa S. Preliminary study on the potential role of the mosque in disaster situation in Indonesia: six mosques in two provinces. London: Islamic Relief Indonesia (IRI) & United Nation Office for Coordination of Humanitarian Affairs; 2011.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

62. **Humaedi MA**. Etnografi pengobatan: praktik budaya peramuan dan sugesti komunitas adat Tau Taa Vana. Yogyakarta: LKiS; 2017.

63. **Humaedi MA**. Tradisi pelestarian hutan masyarakat adat Tau Taa Vana di Tojo Una-Una Sulawesi Tengah. Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam. 2014;11(1):71–90.

64. Setiawan KH, **Humaedi MA**, Astutik S. Ethnobiological study of the plants used in the healing practices of an indigenous people Tau Taa Wana in Central Sulawesi, Indonesia. Procedia: Environmental Sciences (Elsevier). 2014;(20):841–846.

65. **Humaedi MA**. Pengakuan hak-hak kewarganegaraan komunitas adat Tau Taa Vana di Tojo Una-Una Sulawesi Tengah. Jurnal Kajian: Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Kebijakan. 2012;17(3):329–355.

66. **Humaedi MA**. Memaknai wasiat (woum) sebagai kearifan budaya dan faktor pemertahanan bahasa Kafoa pada masyarakat Habollat, Probur Utara, Alor Barat Daya, NTT. Jurnal Jnana Budaya: Media Informasi Sejarah, Sosial dan Budaya. 2013;18(2):175–193.

67. **Humaedi MA**. Aspek sosial budaya orang berbahasa Kafoa di Dusun A (Lola). Dalam: Patji AR, editor. Bahasa, kebudayaan & pandangan tentang kebahasaan masyarakat etnik (Lokal) Kafoa di Alor Nusa Tenggara Timur. Jakarta: LIPI Press; 2014. 117–164.

68. **Humaedi MA**. Pelestarian budaya-bahasa etnik terancam punah. Jurnal Kajian: Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Kebijakan. 2013;18(2):219–245.

69. **Humaedi MA**. Pemetaan peran kepemimpinan di tengah risiko bencana. Dalam: Humaedi MA, editor. Etnografi bencana: peran kepemimpinan lokal di tengah kerentanan dan risiko bencana. Jakarta: LIPI; 2014. 1–28.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

70. Zilioli U. Protagoras and the challenge of relativism. Plato's subtlest enemy–ashgate new critical thinking in philosophy. Burlington: Ashgate; 2007. 8–12.

71. Schuon F. The essential frithjof Schuon. S. Hossein Nasr, editor. Bloomington: World Wisdom; 2005.

72. Saukko P. Doing research in cultural studies. California: Sage Publication; 2003. 25.

73. Horner B. Critical ethnography, ethics and work. Dalam: S G Brown, S.I Dobrin, editor. Ethnography unbound: from theory shock to critical praxis. New York: State University of New York Press; 2004. 5–12.

74. **Humaedi MA**. Etnografi bencana I: mencari mutiara di tengah bencana. Jakarta: LIPI; 2014.

75. **Humaedi MA**. Relocation dilemma: social and cultural challenges in the relocation of the victims of mount Rokatenda disaster. Komunitas: International Journal of Indonesia Society and Culture. Semarang: Semarang State University. 2016;8(2): 221–223.

76. **Humaedi MA**. Perempuan saudagar pengkang dari sabuk khatulistiwa. Yogyakarta: LKiS; 2019.

77. **Humaedi MA**. Budaya hibrida masyarakat Cirebon. Humaniora: Jurnal Internasional Budaya, Sastra dan Bahasa. 2013;25(3):281–295.

78. **Humaedi MA**, Purwaningsih SS. Migrasi penduduk dan pembentukan hibriditas budaya kuliner tradisional pengkang. Jurnal Patrawidya. 2019;20(3):15–35.

79. Smith EE, Kosslyn SM. Cognitive psychology: mind and brain. London: Pearson/Prentice Hall; 2018. 17–19.

80. **Humaedi MA**. Kemiskinan nelayan: studi kasus penyebab eksternal dan upaya revitalisasi tradisi pengentasannya di Kaliori Rembang, Jawa Tengah. Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. 2012;7(2):193–206.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

DAFTAR PUBLIKASI ILMIAH

Buku Internasional

1. **Humaedi MA**, Zulfa S. Preliminary study on the potential role of the mosque in disaster situation in Indonesia: six mosques in two provinces. London: Islamic Relief Indonesia (IRI) & United Nation Office for Coordination of Humanitarian Affairs; 2011.

Buku Nasional

2. **Humaedi MA**. Babahe & Bakpia Pathok 25: harapan dalam sebuah kota bakpia. Jakarta: Gramedia; 2020.
3. **Humaedi MA**. Perempuan saudagar pengkang dari sabuk khatulistiwa. Yogyakarta: LKiS; 2019.
4. **Humaedi MA**, Abdul RP, Bayu S, Sudiyono, Anggy DS. Belajar persatuan dari perbatasan. Jakarta: LIPI Press; 2020.
5. **Humaedi MA**. Perisai Rokatenda: etnografi bencana dalam kerja sama lintas iman. Yogyakarta: Lintas Ilmu; 2019.
6. **Humaedi MA**. Selembayung merah putih. Yogyakarta: Pustaka Sastra; 2018.
7. **Humaedi MA**. Etnografi bencana II: menakar peran para pemimpin lokal dalam pengurangan risiko bencana. Yogyakarta: LIPI & LKiS; 2017.
8. **Humaedi MA**. Etnografi pengobatan: praktik budaya peramuan dan sugesti komunitas adat Tau Taa Vana. Yogyakarta: LKiS; 2017.
9. Patji AR, **Humaedi MA**, Sudiyono. Bahasa, kebudayaan & pandangan tentang kebahasaan masyarakat etnik lokal Kafoa di Alor. Jakarta: LIPI Press; 2014.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

10. **Humaedi MA**. Etnografi bencana I: mencari mutiara di tengah bencana. Jakarta: LIPI; 2014.

11. **Humaedi MA**, Sudiyono. Bahasa Kafoa 2: buku pembelajaran bahasa lokal setempat di Alor, NTT untuk SD kelas 4–6. Jakarta: Valia Pustaka & PMB LIPI; 2014.

12. **Humaedi MA**, Sudiyono. Bahasa Kafoa 1: buku pembelajaran bahasa lokal setempat di Alor, NTT untuk SD kelas 1–3. Jakarta: Valia Pustaka & PMB LIPI; 2014.

13. **Humaedi MA**, Widyasmaramurti. Kamus bahasa Kafoa. Jakarta: LIPI; 2013.

14. **Humaedi MA**, Sakhiyya, Z. Di rumah-Mu kami berlindung: peranan masjid dalam situasi bencana. Yogyakarta: Progresif; 2012.

15. **Humaedi MA**, Patji AR, Kusumaningtyas VA. Ekspedisi menuju tuhan: konsep sehat & praktik pengobatan komunitas adat Tau Taa Wana. Yogyakarta: Valia Pustaka; 2012.

16. **Humaedi MA**, Patji AR, Siburian R, Tondo FH, Fatimah, N. Serumpun berbeda batang: studi etnografi masyarakat perbatasan Sebatik. Yogyakarta: Valia Pustaka; 2011.

17. Ninuk KP, **Humaedi MA**. Etnografi kemiskinan II: lembaga tradisi, antara eksistensi & reproduksi kemiskinan. Jakarta: LIPI Press; 2010.

18. Kleden-Probonegoro N, **Humaedi MA**. Etnografi kemiskinan I: segoro & negoro (kemiskinan dari perspektif kebudayaan). Jakarta: LIPI Press; 2010.

19. **Humaedi MA**, Koswara VD. Profil ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan 2005–2009. Jakarta: Asisten Deputi Urusan Perkembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan Kementrian Negara Riset dan Teknologi RI; 2009.

20. **Humaedi MA**. Islam dan Kristen di pedesaan Jawa. Jakarta: Rumah Buku & Kementerian Agama; 2008. 45.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Bagian dari Buku Nasional

21. **Humaedi MA**. Silang budaya dalam mencipta harmoni keagamaan di perbatasan Leste. Dalam: Humaedi MA & Ahsan K, editor. Praktik kehidupan & pelayanan keagamaan di wilayah perbatasan. Jakarta: Kementerian Agama & Laras Publishing; 2017. 85–124.

22. **Humaedi MA**. Nasionalisme di tengah pemulihan bahasa dan budaya lokal: mengurai para aktor. Dalam: Humaedi MA, editor. Aktor daerah: peran penguatan budaya lokal & integrasi nasional. Jakarta: LIPI Press; 2017. 1–40.

23. **Humaedi MA**. Kafoa: budaya di balik tuturan bahasa dalam modul pembelajaran Kafoa, sebuah eksperimentasi aktor daerah. Dalam: Humaedi MA, editor. Aktor daerah: peran penguatan budaya lokal & integrasi nasional. Jakarta: LIPI Press; 2017. 181–230.

24. **Humaedi MA**. Merangkai adaptasi dalam penguatan kedaulatan NKRI di Kalimantan Barat. Dalam; Humaedi MA, editor. Adaptasi komunitas etnik beda bahasa & budaya di perbatasan Kalimantan Barat. Jakarta: Gading Inti Prima; 2016. 1–31.

25. **Humaedi MA**. Dari rumah betang ke rumah individual: mengurai ekspresi dan reproduksi kebudayaan dan kebahasaan masyarakat Dayak. Dalam: Humaedi MA, editor. Adaptasi komunitas etnik beda bahasa & budaya di perbatasan Kalimantan Barat. Jakarta: Gading Inti Prima; 2016. 177–235.

26. **Humaedi MA**. Menjejak kejayaan, mendedah keunggulan inovasi budaya maritim. Dalam: Humaedi MA Shalihin L, editor. Kaum muda dan budaya maritim nusantara. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan & Ifada Press; 2015. vii –xxx.

27. **Humaedi MA**. Merajut keindonesiaan kita. Dalam: Hikam MAS, editor. Menyongsong 2014–2019 memperkuat Indonesia

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dalam dunia yang berubah. Jakarta: Dewan Analis Strategis Badan Intelijen Negara & Rumah Buku. 2014. 111–178.

28. **Humaedi MA**. Pemetaan peran kepemimpinan di tengah risiko bencana. Dalam: Humaedi MA, editor. Etnografi bencana: peran kepemimpinan lokal di tengah kerentanan dan risiko bencana. Jakarta: LIPI; 2014. 1–28.

29. **Humaedi MA**. Karakter kerentanan ekologis dan sosial budaya masyarakat di wilayah letusan gunung Lokon Sulawesi Utara. Dalam: Humaedi MA, editor. Etnografi bencana: peran kepemimpinan lokal di tengah kerentanan dan resiko bencana di Indonesia Barat dan Timur. Jakarta: LIPI; 2014. 61–123.

30. **Humaedi MA**. Aspek sosial budaya orang berbahasa Kafoa di Dusun A (Lola). Dalam: Patji AR, editor. Bahasa, kebudayaan & pandangan tentang kebahasaan masyarakat etnik (Lokal) Kafoa di Alor Nusa Tenggara Timur. Jakarta: LIPI Press; 2014. 117–164.

31. **Humaedi MA**. Menyemai budaya demokrasi yang bermartabat. Dalam: Humaedi MA Shalihin L, editor. Kaum muda dan budaya demokrasi: bunga rampai lomba esai sosial budaya nasional 2014. Jakarta: Puslitbang Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan & Jalasutra; 2014. ix–xxiii.

32. **Humaedi MA**. Ekspresi kekuasaan masyarakat penutur bahasa Kafoa di Habollat, Alor Barat Daya. Dalam: MA Humaedi, editor. Dari studi ekologi ke pemertahanan bahasa Kafoa di Alor Nusa Tenggara Timur. Jakarta: PT Gading Inti Prima; 2013. 21–64.

33. **Humaedi MA**. Ekspresi bahasa Kafoa dalam kebudayaan tradisional masyarakat Habollat. Dalam: Humaedi MA, editor. Dari studi ekologi ke pemertahanan bahasa Kafoa di Alor Nusa Tenggara Timur. Jakarta: PT Gading Inti Prima; 2013. 159–202.

34. **Humaedi MA**. Pemahaman terhadap dilema sosial kebudayaan: kasus pemimpin lokal dalam pemeranan masjid di situasi bencana. Dalam: Anwar HZ dan Harjono H, editor. Perspektif terha-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dap kebencanaan di wilayah beresiko dan lingkungan di Indonesia. Bandung: Andira & LIPI; 2013. 187–198.

35. **Humaedi MA**. Mekanisme internal pelestarian bahasa dan budaya Kafoa. Dalam: Humaedi MA, editor. Mekanisme internal pelestarian bahasa dan budaya Kafoa. Jakarta: PT Gading Inti Prima; 2013. 1–19.

36. **Humaedi MA**. Praktik tradisi budaya yang linear dengan pelestarian bahasa Kafoa. Dalam: Humaedi MA, editor. Mekanisme internal pelestarian bahasa dan budaya Kafoa. Jakarta: PT Gading Inti Prima; 2013. 95–138.

37. **Humaedi MA**. Pertarungan kekerasan di pegunungan Dieng Banjarnegara tahun 1942–1957. Dalam Abdullah T, editor. Indonesia across orders: arus bawah sejarah bangsa. Jakarta: LIPI Press & Obor; 2010. 233–269.

38. **Humaedi MA**. Ambang batas kebudayaan: sebuah perbandingan proses produksi silang budaya komunitas di Harjamukti Cirebon dan Lumpur Gresik. Dalam: Tirtosudarmo R, editor. Transformasi sosial di perkotaan pantai utara Jawa: studi perbandingan Cirebon dan Gresik. Jakarta: PT Gading Inti Prima; 2012. 190–234.

39. **Humaedi MA**. Modernitas dalam celah-celah tradisi: mengurai etnisitas dan pandangan hidup suku bangsa di Indonesia. Dalam: Patji AR, editor. Etnisitas & pandangan hidup komunitas suku bangsa di Indonesia: bunga rampai kedua studi etnisitas di Sulawesi Tengah dan Kalimantan Selatan. Jakarta: LIPI Press; 2010. 1–21.

40. **Humaedi MA**. Ketika garam tidak lagi gurih, mie dan emas dikejar: ketahanan budaya dalam arus modernitas masyarakat Tau Taa Wana di Dataran Bulang, Sulawesi Tengah. Dalam: Patji AR, editor. Etnisitas & pandangan hidup komunitas suku bangsa di Indonesia: bunga rampai kedua: studi etnisitas di Sulawesi Tengah dan Kalimantan Selatan. Jakarta: LIPI Press: 2010. 67–132.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

41. **Humaedi MA**. Khayali tradisi di tengah realitas: pandangan ilmu magis orang Dayak. Dalam: Patji AR, editor. Etnisitas & pandangan hidup komunitas suku bangsa di Indonesia. Jakarta: LIPI Press; 2010. 103–164.

42. **Humaedi MA**. Strategi bertahan hidup: suatu etnografi masyarakat Pulau Bawean. Dalam: Humaedi MA, editor. Strategi bertahan hidup: studi etnografi budaya masyarakat pulau Bawean. Jakarta: LIPI Press; 2010. 1–18.

43. **Humaedi MA**. Budaya ketahanan pangan masyarakat Pulau Bawean. Dalam: Humaedi MA, editor. Strategi bertahan hidup: studi etnografi budaya masyarakat Pulau Bawean. Jakarta: LIPI Press; 2010. 87–129.

44. **Humaedi MA**. Cerdas membaca ayat-ayat kauniyah dan qouliyah; manfaat iptek dalam menyatukan umat. Dalam: Masyhuri U, editor. Kumpulan khutbah jum'at, beribadah dengan iptek. Jakarta: Pustaka Firdaus; 2009. 57–66; 79–88.

45. **Humaedi MA**. Etnisitas dan pandangan hidup Tahu Taa Wana di Vananga Bulang, Tojo Una-una. Dalam: Patji AR, editor. Etnisitas & pandangan hidup komunitas suku bangsa di Indonesia: bunga rampai studi etnisitas di Sulawesi Tengah. Jakarta: LIPI Press; 2008. 45–78.

Jurnal Nasional

46. **Humaedi MA**, Purwaningsih, SS. Migrasi penduduk dan pembentukan hibriditas budaya kuliner tradisional pengkang. Jurnal Patrawidya. 2019;20(3):15–35.

47. **Humaedi MA**. Perubahan karakter kebudayaan dan etos produktivitas sosial ekonomi di tengah program kebijakan pertanian. Jurnal Integritas Serasan Sekundang. 2019;01(01):31–48.

48. **Humaedi MA**. Penelitian etnografi di balik pencegahan konflik dan affirmative action perlindungan kekayaan budaya: mema-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

hami sebuah hibriditas kebudayaan. Jurnal Masyarakat dan Budaya. 2018;19(3):447–468.

49. **Humaedi MA**. Relocation dilemma: social and cultural challenges in the relocation of the victims of mount Rokatenda disaster. Komunitas: International Journal of Indonesia Society and Culture. Semarang: Semarang State University. 2016;8(2):221–223.

50. **Humaedi MA**. Konversi keagamaan pasca-1965: dampak sosial budaya dan hubungan Islam dan Kristen di pedesaan Jawa. Jurnal Harmoni. 2017;16(2):218–240.

51. **Humaedi MA**. Disaster management based on the perspective of inter-religious connection and local wisdom. Analisa: Journal of Social Science and Religion. 2015;22(2):213–226.

52. **Humaedi MA**. Mengislamkan Jawa: sejarah Islamisasi di Jawa dan penentangnya dari 1930 sampai sekarang karya MC Ricklefs. Jurnal Harmoni. 2015;14(1): 184–197.

53. **Humaedi MA**. Tata kelola sawah dan burung di tengah tradisi rantau. Jurnal Tradisi. 2015;1(1):21–36.

54. **Humaedi MA**. Tradisi pelestarian hutan masyarakat adat Tau Taa Vana di Tojo Una-Una Sulawesi Tengah. Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam. 2014;11(1):71–90.

55. **Humaedi MA**. Kerusuhan Sampang: kontestasi aliran keagamaan dalam wajah kebudayaan Madura. Jurnal Harmoni. 2014;13(2):117–133.

56. **Humaedi MA**. Perubahan nilai-nilai budaya masyarakat Aceh pasca bencana tsunami. Jurnal Patrawidya: Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya. 2014;15(4):561–584.

57. **Humaedi MA**. Dilema memadukan perspektif kebudayaan dalam kebijakan pada kelembagaan litbang di wilayah potensial maju: Kasus propinsi Riau. Jurnal Teknovasi. 2014; 3(2): 35–50.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

58. **Humaedi MA**. Memaknai wasiat (woum) sebagai kearifan budaya dan faktor pemertahanan bahasa Kafoa pada masyarakat Habollat, Probur Utara, Alor Barat Daya, NTT. Jurnal Jnana Budaya: Media Informasi Sejarah, Sosial dan Budaya. 2013;18(2):175–193.

59. **Humaedi MA**. Proses alih status sosial melalui tradisi demdeman (plakat waris) dan ngenger (ikut keluarga). Jurnal Patrawidya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya. 2013; 14(1): 31–52.

60. **Humaedi MA**. Kebiasaan sosial budaya dan tradisi keagamaan yang memudar di masyarakat Prambanan pasca Orde Baru. Jurnal Harmoni. 2013; 12(1): 30–47.

61. **Humaedi MA**. Budaya konsumsi kaum santri di ruang kota. Al-Qalam: Jurnal Keislaman. 2013; 30(1); 23–46.

62. **Humaedi MA**. Dilema peran kelompok haji dalam penguatan tradisi budaya dan sosial keagamaan: Studi kasus masyarakat Sungai Nyamuk Sebatik. Jurnal Masyarakat dan Budaya. 2013; 15(1): 131–156.

63. **Humaedi MA**. Pembentukan praktik budaya naluri dalam Kristenisasi Kiai Sadrach. Jurnal Patrawidya: Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya. 2013;14(4):615–636.

64. **Humaedi MA**. Pendidikan integral keilmuan keagamaan dan konteks sosial kebudayaan dalam menjawab isu-isu kontemporer. Edukasi: Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama dan Keagamaan. 2013;11(3):305–318.

65. **Humaedi MA**. Budaya hibrida masyarakat Cirebon. Humaniora: Jurnal Internasional Budaya, Sastra dan Bahasa. 2013;25(3):281–295.

66. **Humaedi MA**. Pelestarian budaya-bahasa etnik terancam punah. Jurnal Kajian: Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Kebijakan. 2013;18(2):219–245.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

67. **Humaedi MA.** Proses silang budaya komunitas Muslim Wong Lumpur Gresik. Jurnal Karsa. 2013; 21(2): 219–237.

68. **Humaedi MA**. Akomodasi budaya dalam implementasi program pengentasan kemiskinan di pedesaan: studi kasus di Kecamatan Kaliori Rembang Jawa Tengah. Jurnal Kajian: Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan. 2012;17(1):129–157.

69. **Humaedi MA**. Strategi budaya taqiyah: Dilema penyembunyian identitas dalam perkembangan Syiah. Jurnal Harmoni. 2012; 11(3): 8–23.

70. **Humaedi MA**. Karakter sosial budaya 'atas dan bawah' masyarakat penutur bahasa Kafoa. Jurnal Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional. 2012;19(1):95–112.

71. **Humaedi MA**. Kemiskinan nelayan: studi kasus penyebab eksternal dan upaya revitalisasi tradisi pengentasannya di Kaliori Rembang, Jawa Tengah. Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. 2012;7(2):193–206.

72. **Humaedi MA**. Tasawuf sosial: Peran jemaah Tarekat Qadiriyah-Naqsyabandiyah dalam penanganan bencana di Tasikmalaya. Jurnal Tasawuf. 2012; 4(1): 1–14.

73. **Humaedi MA**. Budaya damai sebagai strategi deradikalisasi: Elaborasi budaya dan semangat Islam damai. Nasion: Jurnal Pusat Pengkajian Strategi Nasional (PPSN). 2012; 9(1): 49–68.

74. **Humaedi MA**. Pemenjaraan: penormalan budaya dan kegagalan pembangunan karakter. Jurnal Sosiologi Pendidikan. 2012; 1(1):35–47.

75. **Humaedi MA**. Pengakuan kewarganegaraan komunitas adat terpencil Tau Taa Vana di Tojo Una-Una. Jurnal Kajian: Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan. 2012; 17(3): 329–355.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

76. **Humaedi MA**. Pemikiran Islam dalam jejak kajian humaniora. Jurnal al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam. 2012; 12(2): 397–415.

77. **Humaedi MA**. Mematahkan pewarisan kemiskinan. Jurnal Masyarakat dan Budaya. 2011; 13(3): 83–110.

78. **Humaedi MA**. Peranan masjid dalam situasi bencana: Studi kasus masjid Al-Hikmah di Cigalontang Tasikmalaya. Jurnal Ilmiah Peksos. 2011; 10(1): 1–18.

79. **Humaedi MA**. Jeragan nemen: Dinamika hubungan bakul-langgan dalam perspektif politik-ekonomi. Jurnal Masyarakat Indonesia. 2010; 36(2): 125–126.

80. **Humaedi MA**. Korupsi dari perspektif Islam: Refleksi internalisasi keagamaan dan praktek 'tidak berkebudayaan.' Jurnal Masyarakat Indonesia. 2009; 35(2): 45–64.

81. **Humaedi MA**. Merajut tradisi humaniora Timur dan Barat. Jurnal Masyarakat dan Budaya. 2008;10(2):67–84

82. **Humaedi MA**. Tiga ilustrasi agama dan lokalitas dalam poskolonialisme. Jurnal Religiosa. 2006; 3(1): 15–30.

83. **Humaedi MA**, Pratomo, YP, Sianturi, RR. Pemenjaraan: (Pe(ab) normalan Budaya? Jurnal Masyarakat Budaya. 2005; 7(2): 31–50.

84. **Humaedi MA**. Dombret: Konflik dan harmoni teknologi budaya lokal. Jurnal Dinamika Masyarakat Budaya IPTEK. 2002; 3(3): 9–28.

Prosiding Internasional

85. Himmi SK, **Humaedi MA**, Astutik S. Ethnobiological study of the plants used in the healing practices of an indigenous people Tau Taa Wana in Central Sulawesi, Indonesia. Procedia: Environmental Sciences (Elsevier). 2014;(20):841–846.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

86. **Humaedi MA**. Mencuri kesempatan dari gempita trans national Islamic movement. Konferensi Internasional politik identitas: Agama, etnisitas, dan ruang di Indonesia dan Asia. Percik dan the Toyota Foundation. 2008:67–82.

Prosiding Nasional

87. **Humaedi MA**. Budaya air dan perumusan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya air. Dalam: Humaedi MA dkk., editor. Banyu bening: pembelajaran dan pengalaman pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Jakarta: APCE; 2017.

88. **Humaedi MA**, Seftiani S, Rembeth JV, Propiona JK, Hakam S. Efektivitas peran kepemimpinan lokal dalam upaya pengurangan risiko bencana di Indonesia. Dalam: Anwar HZ, Lubis RF, editor. Prosiding hasil-hasil penelitian kompetitif kebencanaan dan lingkungan tentang upaya LIPI untuk mendukung ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana dan masalah lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam maupun manusia". Jakarta: LIPI; 2014.

89. **Humaedi MA**, Hisyam M, Seftiani S, Rembeth JV. Efektivitas peran kepemimpinan lokal dalam upaya pengurangan risiko bencana. Dalam: Harjono H, editor. Prosiding pemaparan hasil penelitian geoteknologi LIPI tentang ilmu kebumian untuk kehidupan yang lebih baik. Bandung: Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI; 2013. 51.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

DAFTAR PUBLIKASI LAINNYA

Karya Tulis Akhir Studi

1. **Humaedi MA**. Radikalisme Islam pedesaan Jawa: akar masalah dan mekanisme pencegahannya [Disertasi Studi Islam di bidang Antropologi Agama]. [Yogyakarta]: , Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga; 2008.
2. **Humaedi MA**. Dari tradisionalisme santri ke kapitalisme tanda [Tesis Magister Ilmu Religi dan Budaya kekhususan bidang Ilmu Budaya]. [Yogyakarta]: Pascasarjana Universitas Sanata Dharma; 2004.
3. **Humaedi MA**. Kemiskinan & keimanan: lansiran dakwah dan misi afirmasi *pro-poor* [Tesis Magister Hubungan Antar Agama]. [Yogyakarta]: Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga; 2001.
4. **Humaedi MA**. Hewan melata dalam Al-Qur'an: studi tematik atas berbagai karakter makhluk hidup [Skrips]. [Yogyakarta]: Jurusan Tafsir Hadits, Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan Kalijaga; 1998.

Makalah Internasional

5. **Humaedi MA**. Indonesia imajiner dalam kuasa Ternate tak terlupakan: pengecualian menjadi warga negara Indonesia bagi masyarakat adat Tau Taa Vana di Dataran Tinggi Bulang, Tojo Una-Una Sulawesi Tengah. Seminar internasional ke-13 Percik Salatiga tentang dinamika politik lokal di Indonesia: kewargaan subnasional dan cita-cita negara bangsa dalam dinamika dan perspektif lokal. Salatiga; 10–13 Juli 2012.
6. **Humaedi MA**. Djawa Tengah kotor: reinkarnasi dan kontestasi politik-agama dalam kepentingan dakwah politik dan atau politisasi dakwah bagi masyarakat. Seminar internasional dinamika

Buku ini tidak diperjualbelikan.

politik lokal di Indonesia. Percik dan the Ford Foundation. Salatiga; 28–30 Juli 2009.

7. **Humaedi MA**. Crime and social conflict in the mountainous villages 1942–1937. Seminar internasional Indonesia Across Orders. KITLV, NIOD dan LIPI. Yogyakarta; 13 November 2006.

Makalah Nasional

8. **Humaedi MA**. Menakar peranan pemimpin lokal tradisional dalam penanganan bencana alam pascabencana. Pada forum sinkronisasi dan koordinasi pemantapan pengelolaan wilayah khusus, dengan tema: optimalisasi penanganan bencana alam pada pasca bencana di Indonesia untuk memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa, Menteri Koordinator Politik, Keamanan dan Hukum di Jakarta; 5 November 2014.

9. **Humaedi MA**. Artikulasi kebencanaan: penggugahan teologi sosial dalam upaya peningkatan peran masjid pada penanganan bencana. Pada acara bedah buku tentang peran BNPB dan BPBD dalam fasilitasi partisipasi aktif masyarakat rentan dalam penanggulangan bencana. Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Bengkulu; 13 Oktober 2014.

10. **Humaedi MA**. Mengerti budaya, memudahkan penanganan bencana korban letusan Rokatenda NTT. Acara exspose buku Perisai Rokatenda. Humanitarian Forum Indonesia dan UN OCHA. Jakarta; 17 Juli 2014.

11. **Humaedi MA**. Metode analisis dan teknik penulisan penelitian kualitatif etnografi pada bimbingan teknis pengolahan data. Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah Provinsi. Bengkulu; 16 Juni 2014.

12. **Humaedi MA**. Memetakan sistem budaya pada kepemelukan agama komunitas Rokatenda. Pada meeting on Christian-Muslim disaster preparedness and response meeting, by Center for

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Disaster Risk Management & Community Development Studies (CDRM&CDS), OCHA and Humanitarian Forum Indonesia (HFI). Medan; 11 Juni 2014.

13. **Humaedi MA**. Partisipasi masyarakat dalam redistribusi tanah obyek landreform. Workshop riset dan instrumen implikasi pelaksanaan redistribusi TOL oleh Badan Pertanahan Nasional. Jakarta; 12 Juni 2014.

14. **Humaedi MA**. Konflik SARA dan hubungan antar agama: strategi budaya dalam peringatan dini, pencegahan dan peredaman konflik SARA dan gerakan radikal berbasiskan mitologi Keindonesiaan dan interfaith logic. Seminar Indonesia Outlook 20142–2019, Kajian perkembangan bidang energi dan sumber daya alam, hubungan internasional, dan sosial budaya, Himpenindo dan Dewan Analis Strategis BIN. Bali; 25 Februari 2014.

15. **Humaedi MA**. Mempraktikkan prinsip keluar dari zona aman dalam keluasan dan kedalaman pengumpulan data etnografi. Kegiatan bimbingan teknis peneliti dengan tema Mengerti Etika, Meneguhkan Integritas. Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh. Medan; 29–31 Januari 2014.

16. **Humaedi MA**. Strategi budaya untuk mengungkap kedalaman data etnografi. Pelatihan penelitian dengan tema Peningkatan Kemampuan Ilmiah Pendukung Kinerja STID Muhammad Natsir. 22 Januari 2014.

17. **Humaedi MA**. Ketika rasa ingin tahu hadir: mengemas hasrat meneliti dan menulis dengan metode kualitatif. Kegiatan Workshop Metode Penelitian. Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta; 03 November 2013.

18. **Humaedi MA**. Di rumah-Mu kami berlindung: mengurai peranan masjid dalam situasi bencana. Pada Acara Bedah Buku Peran Masjid dalam Situasi Bencana di Indonesia dalam Pertemuan Forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dan rangkaian Kegiatan Peringatan Bulan PRB, oleh BNPB dan UN OCHA. Nusa Tenggara Barat; 7 Oktober 2013.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

19. **Humaedi MA**. Kerusuhan Sampang: kontestasi aliran keagamaan. Seminar Studi Kasus Hubungan Antarumat Beragama dan Aliran, Paham gerakan Kegamaan Tahun 2012. Puslitbang Kehidupan Agama Kementerian Agama. Jakarta; 27 Desember 2012.

20. **Humaedi MA**. Budaya taqiyah dalam politik identitas penganut aliran Syiah. Dalam Temu Riset Keagamaan Tingkat Nasional X Riset Keagamaan dalam Lintasan Peradaban di Indonesia. Puslitbang Kehidupan Agama Kementerian Agama. Bali; 6–9 November 2012.

21. **Humaedi MA**. Code of conduct kebudayaan dan interfaith logic dalam kerja-kerja kemanusiaan. Dalam Workshop Gerakan Kemanusiaan Non-Struktural di Indonesia: Peluang dan Tantangan. Humanitarian Forum Indonesia. Jakarta; 18 Juli 2012.

22. **Humaedi MA**. Mencipta Islam bener lan pener: strategi budaya dalam pembatasan fanatisme sempit dan primordialisme agama. Dalam Pertemuan Ilmiah Pesantren Damai: Melalui Pesantren Damai Mahasiswa dan Pemuda Membangun Komunitas Damai di Kampus dan Masyarakat, oleh Muzaik Institute dan Omah Pirukun. Yogyakarta; 02 Juli 2012.

23. **Humaedi MA**. Melepas setan gundul, stimulasi ikhtiar kebudayaan untuk peduli terhadap keadaan remaja". Pada saresehan penggiat dan kreator seni: Rintisan untuk memberikan iklim kreatif bagi remaja Kabupaten Wonogiri. Lingkar Air dan Percik Salatiga. Wonogiri; 16 Mei 2012.

24. **Humaedi MA**. Strategi pelestarian hutan dalam budaya masyarakat Tau Taa Wana. Diskusi tentang kearifan lokal masyarakat adat di Sulawesi Tengah" oleh BPPI. Jakarta; 27 Juli 2011.

25. **Humaedi MA**. Persemaian budaya damai: Islam damai yang meminimalisir gerakan Islam radikal. Pertemuan dan diskusi pendeta-pendeta gereja baptis seluruh Indonesia di Gereja Baptis Indonesia. Jakarta; 2–3 Juli 2011.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

26. **Humaedi MA**. Politik identitas dalam sosok dan gerakan keagamaan Kiai Sandrach. Diskusi religi dan budaya UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta; 29 Januari 2010.

27. **Humaedi MA**. Budaya sadar dan ajak-tindak dalam melestarikan lingkungan. Diskusi nasional penyadar-tahuan lingkungan, DK-TI-LIPI di Sukabumi. Jawa Barat; 10 Oktober 2009.

28. **Humaedi MA**. Kuasa kelola ruang kota kudus dalam membentuk budaya konsumsi kaum santri. Seminar pengelolaan ruang kota yang bermanfaat bagi transformasi sosial budaya masyarakat. Ikhtiar Madani Anak Negeri dan Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta; 9 Agustus 2008.

29. **Humaedi MA**. Reformulasi keilmuan Ushuluddin: posisi ilmu bantu dalam khazanah the rise of colleges dan the rise of humanism di tengah kajian keilmuan kontemporer di UIN. Pekan Ilmiah Nasional II Reformulasi Pengetahuan: Upaya menyelesaikan problematik kebangsaan oleh UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta; 5 Maret 2008.

30. **Humaedi MA**. From debt in services to debt in honor cultivating business mentality and redesigning ethnic culture. Research exposure atas riset investigasi, strategi dan kebijakan pendampingan ekonomi korban bencana. YTB Indonesia/. Jakarta; 11 Desember 2007.

31. **Humaedi MA**. Kerasnya ruang keberpenjaraan: semiotika struktur ruang penjara Nusakambangan Cilacap terhadap intertekstualitas pembentukan modus. Diskusi nasional bahasa dan politik kekuasaan bagi dosen ilmu sosial oleh Ikhtiar Madani Anak Negeri. Yogyakarta; 1 Mei 2007.

32. **Humaedi MA**. Gaboengan Romusha Ngamoek: pertarungan kekerasan di kaki pegunungan Dieng Banjarnegara, tahun 19422–1957. Disampaikan pada Konferensi Nasional Sejarah ke VIII, diselenggarakan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI. Jakarta; 13–16 November 2006.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

33. **Humaedi MA**. Orang PKI di tengah pergumulan komunitas Islam Kristen (kasus di pedesaan kaki gunung Slamet-Dieng). Seminar Relasi agama-negara, pengalaman Islam-Kristen. PMII Yogyakarta. The Religious Reform Project dan Kedutaan Swiss. Yogyakarta; 2 Juli 2006.

34. **Humaedi MA**. Gempita takbir di tengah hujatan: kekerasan di pedesaan Dieng Jawa tengah dalam sorotan media massa, 19402–1957. Disampaikan pada lokakarya hasil akhir penelitian program pelatihan dan penelitian sejarah Indonesia across orders: reorganization of Indonesia society 19302–1960 oleh PMB-LIPI dan NIOD. Subang; 262–29 Maret 2006.

35. **Humaedi MA**. Takbir tanpa keagungan: kekerasan ekonomi atas nama agama di kaki gunung Dieng, 19302–1957. Disampaikan dalam seminar Indonesia dalam lintas kekuasaan: Belanda, Jepang dan Kemerdekaan Periode 19302–1960. PMB-LIPI & NIOD. Padang; 32–5 Agustus 2005.

36. **Humaedi MA**. Budaya penjara dan pesantren: semiotika struktur ruang penjara Nusakambangan Cilacap dan Pesantren Lirboyo Kediri terhadap interekstualitas pembentukan budaya dan moralitas. Disampaikan pada seminar RUKK dan diskusi pengembangan ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan, diselenggarakan oleh Kementrian Riset dan Teknologi. Jakarta; 15 Oktober 2003.

37. **Humaedi MA**. Dombret: seni tradisional dalam wajah budaya populer. Seminar hasil akhir RUKK dan diskusi pengembangan ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan di Indonesia oleh Kantor Kementrian Riset dan Teknologi bekerjasama dengan LIPI; 14–15 Oktober 2002.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Modul dan Media Lainnya

38. **Humaedi MA**. Kreativitas dalam industri kuliner. Jakarta: www.lpdp.go.id; 2018.
39. **Humaedi MA**, Sambodo MT. Modul penyusunan proposal penelitian. Jakarta: Pusbindiklat LIPI; 2017.
40. **Humaedi MA**. Insan muda, ilmuan masa depan. Jakarta. www.bkhh.lipi.go.id; 2017.
41. **Humaedi MA**. Skenario film Kafoa untuk selamanya (Kafoa gena wai ligeya). Jakarta: LIPI; 2016.
42. **Humaedi MA**, Nurhasim. Modul teknik pengumpulan dan penelusuran data penelitian. Jakarta: Pusbindiklat LIPI; 2016.
43. **Humaedi MA**, Tessa A. Karra mappadendang: screen teater rakyat Bugis. Jakarta; 2015.
44. **Humaedi MA**, Myrtha L. Modul penyusunan proposal diklat teknis LIPI. Jakarta: Pusbindiklat LIPI; 2014.
45. **Humaedi MA**. Senarai kata bahasa Kafoa. Jakarta: LIPI; 2011.
46. **Humaedi MA**. Islam damai dalam menghadapi Islam garis keras. Media Masjid. Jakarta: Juli–Agustus 2011.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama	: **M. Alie Humaedi**
Tempat, Tgl. Lahir	: Cirebon, 20 Juli 1976
Anak ke	: Empat dari lima bersaudara
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Nama Ayah Kandung	: Ma'mun Alie
Nama Ibu Kandung	: Tusrinah
Nama Istri	: Uswatun Hasanah
Jumlah Anak	: 3
Nama Anak	: 1. Lautan Hesychia Hayes Usha 2. Aliena Anaqu Arung Pasisir 3. Merha Ihsha Lembayung Bumi
Nama Instansi	: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI
Judul Orasi	: Menggugah Empati, Menarik Simpati: Kekuatan Etnografi *Post*-Kritis dalam Mendorong Kebijakan Berbasiskan Kebudayaan Lokal
Bidang Kepakaran	: *Post*-Kolonial
No. SK Pangkat	: No. 2371/Kep/J.3-c/2019
No. SK Presiden	: No. 42/M Tahun 2016

Buku ini tidak diperjualbelikan.

B. Pendidikan Formal

No.	Jenjang	Sekolah/PT/Univ	Kota/ Negara	Lulus
1.	SD	SD Negeri I Gebang Kulon	Cirebon	1988
2.	SMP	MTS Negeri Babakan Ciledug	Cirebon	1991
3.	SMA	MAN Cirebon I	Cirebon	1994
4.	S1	IAIN Sunan Kalijaga	Yogyakarta	1998
5.	S2	IAIN Sunan Kalijaga	Yogyakarta	2001
6.	S2	Universitas Sanata Dharma	Yogyakarta	2004
7.	S3	UIN Sunan Kalijaga	Yogyakarta	2008

C. Pendidikan Non-Formal

No.	Pelatihan	Tempat/Kota/ Negara	Tahun
1.	Pelatihan Sejarah dan Etnografi–Indonesia *Across Orders: The Organisation of Indonesia Society* (NIOD)	Jakarta	2003
2.	Pelatihan Penelitian Etnografi Budaya	Jakarta	2005
3.	Training Program on *"Indonesia Across Orders: The Organisation of Indonesia Society II*	Jakarta	2005
4.	Investigasi dan Evaluasi Program, Oxfam Indonesia	Jakarta	2006
5.	Evaluasi Program Pemberdayaan, Ausaid	Jakarta	2006
6.	Prajabatan	Jakarta	2008
7.	Diklat Fungsional Peneliti Tingkat Pertama	Jakarta	2008

Buku ini tidak diperjualbelikan.

No.	Pelatihan	Tempat/Kota/ Negara	Tahun
8.	Diklat Metode Penelitian dan Pengolahan Data	Jakarta	2008
9.	Diklat Fungsional Peneliti Tingkat Lanjutan	Jakarta	2013
10.	*Training of Trainer (*ToT) Widyaiswara Luar Biasa Diklat Fungsional Peneliti	Jakarta	2013
11.	*Training of Trainer* (ToT) Widyaiswara Diklat Fungsional Peneliti II	Jakarta	2016

D. Jabatan Fungsional

No.	Jabatan Fungsional	TMT Jabatan
1.	Peneliti Muda III/d	1 Februari 2010
2.	Peneliti Madya IV/b	1 Mei 2012
3.	Peneliti Utama IV/e	1 Juli 2016

E. Penugasan Khusus Nasional/Internasional

No.	Jabatan/Pekerjaan	Pemberi Tugas	Tahun
1.	*Livelihood Investigator* untuk Dana Bantuan Kemanusiaan Aceh	Christian Aid – Yayasan Tanggul Bencana di Indonesia	2007
2.	*Livelihood Investigator* untuk Program Kemanusiaan di Wilayah Selatan Jawa dan Sumatera	UNOCHA	2008
3.	Koordinator Utama Penulisan bidang Sosial buku Indonesia Menyongsong 2020–2025 Dewan Analisis Strategis	Badan Intelijen Negara (BIN)	2014

Buku ini tidak diperjualbelikan.

No.	Jabatan/Pekerjaan	Pemberi Tugas	Tahun
4.	*External Evaluator and Investigator* Lampung Conflict Resolution	UNDP	2014
5.	Anggota Tim Penelitian Konflik Lampung	Kantor Wakil Presiden	2015
6.	Ketua Tim Penelitian Kompetitif bidang kebencanaan	LIPI	2015
7.	Komite Teknik RSNI Mitigasi Bencana	BNPB	2016
8.	Komite Teknik RSNI Peringatan Dini Berbasiskan pada Pengetahuan Lokal	BNPB	2017
9.	*Deputy Director* Public Awareness Asia Pasific Center for Ecohydrology (APCE)	LIPI	2017
10.	Evaluasi Program untuk Desa-desa Adat di Maluku	Australian Aid	2017
11.	Analis Pematangan Cipta Kondisi Pasca-Konflik	Kementerian Pertahanan	2017
12.	Anggota *Quick* Respon Pencegahan Konflik Berkelanjutan di Berbagai Daerah Rawan	Badan Intelijen Negara	2018
13.	Konsultan	Markas Besar Kepolisian RI	2018
14.	*Livelihood Investigator* Pemberdayaan Perempuan	Internasional Muslim Aid	2018
15.	Penilai dan Pendamping Penelitian	Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan dan kebudayaan	2019
16.	Penilai dan *Reviewer* Penelitian	Pusat Arkeologi Nasional	2020

Buku ini tidak diperjualbelikan.

No.	Jabatan/Pekerjaan	Pemberi Tugas	Tahun
17.	Perumus Capaian Pembelajaran	Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	2020
18.	Konsultan Urban Nexus	Yayasan Kausa Resiliensi Indonesia dan Plan Internasional	2020

F. Keikutsertaan dalam Kegiatan Ilmiah

No.	Nama Kegiatan, Tempat	Peran/ Tugas	Tahun
1.	Konferensi Internasional ke-9 politik identitas: Agama, etnisitas, dan ruang di Indonesia dan Asia. Percik dan the Toyota Foundation, Salatiga	Pembicara	2008
2.	Seminar internasional Indonesia *Across Orders*. KITLV, NIOD dan LIPI, Yogyakarta	Pembicara	2008
3.	Seminar internasional ke-13 dinamika politik lokal di Indonesia: Kewargaan sub-nasional dan cita-cita negara bangsa dalam dinamika dan perspektif lokal. Percik dan the Ford Foundation Salatiga.	Pembicara	2012
4.	Pertemuan Forum Pengurangan Risiko Bencana dan rangkaian Kegiatan Bulan PRB, oleh BNPB dan UN OCHA di NTB	Pembicara	2013
5.	*Indonesia Outlook* – Menyongsong Indonesia 2025, Dewan Analis Strategis BIN di Dua Kota (Jakarta, Bali)	Koordinator Pelaksana	2014

Buku ini tidak diperjualbelikan.

6.	Kebencanaan dan lingkungan tentang upaya LIPI untuk mendukung ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana dan masalah lingkungan, Bandung	Pembicara	2014
7.	Optimalisasi penanganan bencana alam pada pasca bencana di Indonesia untuk memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa, Menteri Koordinator Politik, Keamanan dan Hukum di Jakarta.	Pembicara	2014
8.	Peran BNPB dan BPBD dalam fasilitasi partisipasi aktif masyarakat rentan dalam penanggulangan bencana. Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Bengkulu	Pembicara	2014
9.	*Meeting on Christian-Muslim disaster preparedness and response meetin*g, Center for Disaster Risk Management & Community Development Studies (CDRM&CDS), OCHA and Humanitarian Forum Indonesia (HFI) di Medan.	Pembicara	2015
10.	Rokatenda *Partnership* – Pertemuan Lintas Iman dalam Gerakan Kemanusiaan Rokatenda di Maumere-NTT	Pembicara	2015
11.	Pembelajaran dan Pengalaman Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia APCE, Yogyakarta	Pembicara	2017
12.	Strategi Budaya dalam Penanganan Konflik di Perbatasan, Jakarta	Pembicara	2018

Buku ini tidak diperjualbelikan.

G. Editor Jurnal/Prosiding

No.	Nama Jurnal/Prosiding	Peran/Tugas	Tahun
1.	*Jurnal Widyariset* Pusbindiklat LIPI	Mitra Bestari	2015– 2018
2.	*Jurnal Widyalitera* Pusbindiklat LIPI	Mitra Bestari	2017–2018
3.	*Jurnal Masyarakat dan Budaya LIPI*	Redaktur & Penelaah	2015–sekarang
4.	*Jurnal Hukum dan HAM*	Mitra Bestari	2015
5.	*Jurnal Harmoni*, Kementerian Agama RI	Mitra Bestari	2015–sekarang
6.	*Jurnal Educatia*, STAIN Metro	Mitra Bestari	2015–sekarang
7.	*Bulletin Kesehatan* Kementerian kesehatan	Mitra Bestari	2020
8.	*Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*	Penelaah	2020

H. Karya Tulis Ilmiah

No.	Kualifikasi Penulis	Jumlah
1.	Penulis Tunggal	74
2.	Bersama Penulis lainnya	15
	Total	89

No.	Kualifikasi Bahasa	Jumlah
1.	Bahasa Indonesia	85
2.	Bahasa Inggris	4
3.	Bahasa lainnya	-
	Total	89

Buku ini tidak diperjualbelikan.

I. Pembinaan Kader Ilmiah

Pejabat Fungsional Peneliti

No.	Nama	Instansi	Peran/Tugas	Tahun
1.	Lukman Shalihin	Kementerian Pendidikan Kebudayaan	Pembimbing	2014
2.	Anggy Afriansyah	LIPI	Pembimbing	2014
3.	Fauzan A.	Arsip Nasional	Pembimbing	2014
4.	Imam Syafi'i	LIPI	Pembimbing	2015
5.	Muchlis M. Hanafi	Kementerian Agama	Pembimbing	2015
6.	Mahmudah	Kementerian Agama	Pembimbing	2016
7.	Siti Arafah	Kementerian Agama	Pembimbing	2016
8.	Edi S	Kementerian Agama	Pembimbing	2016
9.	Zulfia Hanu Alfi Syahr	Mahkamah Agung	Pembimbing	2017
10.	Muhamad Zaky Albana	Mahkamah Agung	Pembimbing	2017
11.	Salimulloh Tegar Sanubarianto	Kantor Bahasa	Pembimbing	2017
12.	St. Suryani	Balitbangda Sulsel	Pembimbing	2017
13.	Retno Setyowati	Kementerian Lingkungan Hidup	Pembimbing	2017
14.	Kun Esti Maharani	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pembimbing	2017
15.	Desmiawati	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pembimbing	2017

Buku ini tidak diperjualbelikan.

No.	Nama	Instansi	Peran/Tugas	Tahun
16.	Indah Pratiwi	Kementerian Pendidikan Kebudayaan	Pembimbing	2017
17.	Genardi Atmadiredja	Kementerian Pendidikan Kebudayaan	Pembimbing	2018
18.	Panji Sopiadisna	Pusat Arkeologi Nasional	*Coach*	2018
19.	Mega Hapsari	Pusat Arkeologi Nasional	*Coach*	2018
20.	Nico Alamsyah	Pusat Arkeologi Nasional	*Coach*	2018
21.	Harriyadi	Pusat Arkeologi Nasional	*Coach*	2018
22.	Ashar Murdiastomo	Pusat Arkeologi Nasional	*Coach*	2018
23.	Dimas Seno Bismoko	Pusat Arkeologi Nasional	*Coach*	2018
24.	Widya Murdani	Kementerian Pertanian	Pembimbing	2019
25.	Heidi Yuriasmari	Kementerian Pertanian	Pembimbing	2019
26.	Ardana-reswari Ayu Pitaloka	LIPI	Pembimbing	2017
27.	Aditya Wisnu Pradana	LIPI	Pembimbing	2020
28.	Al Araf Assadallah Marzuki	LIPI	Pembimbing	2020
29.	Praditya Mer Hananto	LIPI	Pembimbing	2020
30.	Letsu Vella Sundary	LIPI	Pembimbing	2020

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Mahasiswa

No.	Nama Bimbingan	PT/Universitas	Tahun Lulus
1.	Sutomo	UIN Sunan Kalijaga	2015
2.	Ahmas Syakir	UIN Sunan Kalijaga	2015
3.	Yudhanty Pareswati	Universitas Indonesia	2016
4.	Masyrufa Zuchrufa	Universitas Brawijaya	2017

J. Organisasi Profesi Ilmiah

No.	Jabatan	Nama Organisasi	Tahun
1.	Wakil Ketua Bidang Pengembangan Organisasi	Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo)	2015–2018
2.	Wakil Ketua Publikasi dan Diseminasi Ilmiah	Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI)	2016–2019
3.	Anggota	Masyarakat Penanggulangan Bencana di Indonesia (MPBI)	2014–sekarang
4.	Anggota	Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo)	2018–sekarang
5.	Pengurus Pusat–Komisi Teknik	Pergizi Pangan	2019–sekarang

K. Tanda Penghargaan

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	Satyalancana Karya Satya X	Presiden	2018

Buku ini tidak diperjualbelikan.

LIPI

BRIN

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

LIPI

LIPI Press

Gedung PDDI LIPI, Lantai 6
Jln. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta 12710
Telp. (+62 21) 573 3465
E-mail: press@mail.lipi.go.id
Website: lipipress.lipi.go.id

ISBN 978-602-496-131-2